

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA  
LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU (STUDI PROGRAM  
SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu*

*Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Islam Riau*



**Fauziah Zam**

**NPM: 167110275**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya alhamdulillah dengan segala do'a serta usaha dan keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru)** “ penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini kurang ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakzulan serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M.CL selaku Rektorat Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis dalam menuntut ilmu.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Evi Zubaidah, S.Sos.I.,MPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Terima kasih banyak atas bantuan dari bapak/ibu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta perwakilan Tim pelaksana sekolah ramah anak di jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru yang terlibat dalam penelitian ini.
7. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada orang tua yang tidak pernah berhenti menyemangati, memberikan kepercayaan kepada saya dan mendo'akan saya, Ayahanda Zamzalis dan Ibunda Darlis dan untuk adik saya Muhammad Faisal Zam yang senantiasa memberikan dukungan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Vieny Meiliany, Eka Safitri, Desi Pratiwi, Ardia Ravita, Devi Fitri, Febby Dwi Ananda, yang selalu memberikan penulis semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan 2016 Ilmu Administrasi Publik Kelas B yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a serta memberikan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis tidak menutup diri untuk mendapatkan kritik dan saran yang tentunya menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penulis berharap semoga usulan skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya.

**Wassalamu'alaikun Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Pekanbaru, 11 November 2021

Penulis,

Fauziah Zam  
167110275

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>II</b>
<b>SK TIM PENGUJI.....</b>	<b>III</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XIV</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVI</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	14
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>16</b>
2.1.Studi Kepustaka .....	16
2.1.1.Administrasi Publik.....	16
2.1.2.Organisasi Publik .....	18

2.1.3.Manajemen Publik .....	20
2.1.4.Kebijakan Publik .....	21
2.1.5.Implementasi kebijakan .....	22
2.1.6.Kota Layak Anak (KLA) .....	27
2.1.7.Sekolah Ramah Anak .....	30
2.2.Kerangka Pikir .....	32
2.3.Konsep Operasional .....	33
2.4.Operasionalisasi Variabel .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1.Tipe Penelitian .....	37
3.2.Lokasi Penelitian.....	37
3.3.Informan dan Key Informan .....	38
3.4.Teknik Penarikan Informan .....	39
3.5.Jenis dan Sumber Data.....	40
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7.Teknik Analisa Data .....	42
3.8.Uji Keabsahan Data .....	43
3.9.Jadwal Kegiatan Penelitian .....	45
3.10.Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	46
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
4.1.Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	47
4.2.Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.....	48
4.2.1.Profil Dinas Pndidikan Kota Pekanbaru .....	48
4.2.2.Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	48
4.2.3.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	49
4.2.4.Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Kesiswaan SMP .....	49
<b>BAB V.....</b>	<b>51</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>

5.1.Indentitas Informan Penelitian .....	51
5.2.Hasil dan Pembahasan .....	54
5.2.1.Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	54
5.2.2.Sumber Daya .....	61
5.2.3.Karakteristik Agen Pelaksana .....	67
5.2.4.Sikap atau Kecenderungan (dispotition) Para Pelaksana .....	74
5.2.5.Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana .....	79
5.2.6.Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	84
<b>BAB VI.....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
6.1.Kesimpulan .....	90
6.2.Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. 1. Jumlah sekolah yang sudah di SK kan setiap tahunnya mulai 2018. s.d tahun 2020 .....	7
I.2. Bentuk Tindak Kekerasan yang Terjadi Dalam Lingkungan Sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2018 s.d 2020.....	9
II.1. Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru.....	35
III.1. Key Informan Penelitian .....	39
III.2. Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1. Model Pendekatan The Policy Implementation Proses .....	24
II.2. Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru ( Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru).....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran I	Pedoman Wawancara Pelaksana Sekolah Ramah Anak Pada Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA Negeri di Kota Pekanbaru .....	75
Lampiran II	Pedoman Wawancara Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.....	79
Lampiran III	Dokumentasi Foto-foto saat penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru .....	81
Lampiran IV	Data yang diperoleh saat kegiatan penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru .....	85
Lampiran V	Surat Riset Penelitian .....	90
Lampiran VI	Surat Keterangan Selesai Melakukan.....	94

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam

Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Zam  
NPM : 167110275  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul UP : Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keungan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar proposal yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2021

Pernyataan  
  
METER TEMPEL  
9712AJX588067831

Fauziah Zam

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA  
LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU (STUDI PROGRAM  
SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI KOTA PEKANBARU)**

**ABSTRAK**

Oleh

**FAUZIYAH ZAM  
(167110275)**

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru). Kebijakan Kota Layak Anak memiliki lima klaster hak anak. Pada klaster empat, yang menjadi unggulan di Kota Pekanbaru yaitu program sekolah ramah anak, penelitian ini memakai konsep teori Van Horn dan Van Metter. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik penarikan informan dengan teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Snowball Sampling*. Informan penelitian yaitu perwakilan dari pelaksana sekolah ramah anak, di sekolah dan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada program sekolah ramah anak sudah terimplementasi dengan berhasil, sudah mulai berkurang tidak kekerasan disekolah. Sumber daya manusia, dana, dan waktu sudah tersedia, untuk sumber dana belum terdapat transparansi berapa persen dana disatuan pendidikan. Karakteristik agen pelaksana terdapat keterbatasan tim pelaksana terlibat langsung karena virus Covid-19, sebagian sekolah belajar dari rumah. Sikap atau kecenderungan (dispotition) para pelaksana untuk tim pelaksana memahami program sekolah ramah anak dari kegiatan sosialisasi, dengan terlaksananya program pendukung sekolah ramah anak berarti sudah diterima tidak ada penolakan. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, sudah akurat komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ketika sekolah mengadakan sosialisasi program sekolah ramah anak. Terlaksananya setiap program dari Dinas Pendidikan berarti komunikasi berjalan baik. Lingkungan ekonomi kondusif perekonomian stabil. Lingkungan sosial kondusif dari masyarakat sekitar yang hamonis. Lingkungan politik sudah kondusif, aman tidak mempengaruhi program sekolah ramah anak.

**POLICY IMPLEMENTATION DEVELOPMENT OF CHILD-FRIENDLY  
REGENCY/CITY (CFR) IN PEKANBARU CITY (STUDY OF CHILDREN-  
FRIENDLY SCHOOL (CFS) PROGRAMS IN PEKANBARU CITY)**

**ABSTRACT**

**By**

**FAUZIYAH ZAM**

**(167110275)**

*Keywords: Policy Implementation, Child Friendly Cities, Child Friendly Schools.*

*Implementation of Child Friendly Regency/City Development Policy (CFR) in Pekanbaru City (Study of Child Friendly School Program (CFS) in Pekanbaru City). The Child Friendly City Policy has five clusters of children's rights. In cluster four, which is the flagship in Pekanbaru City, namely the child-friendly school program, this study uses the theoretical concepts of Van Horn and Van Metter. This study uses a qualitative-descriptive research method. Informant withdrawal technique with purposive sampling technique and snowball sampling technique. Research informants are the implementers of child-friendly school programs, implementers in schools and implementers at the Pekanbaru City Education Office. Research data collection techniques with observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the size and objectives of the Child Friendly City Policy in Pekanbaru City in the child-friendly school program have been implemented successfully, and violence in schools has begun to decrease. Human resources, funds, and time are available, for the source of funds there is no transparency about the percentage of funds in the education unit. The characteristics of implementing agents are that there are limitations for the implementing team to be directly involved because of the Covid-19 virus, some schools learn from home. The attitude or tendency of the implementers for the implementing team to understand the child-friendly school program from socialization activities, with the implementation of the child-friendly school support program means that it has been accepted there is no rejection. Communication between Organizations and Implementing Activities, communication between schools and the Pekanbaru City Education Office was accurate when the school held a socialization of the child-friendly school program. The implementation of every program from the Education Office means that communication is going well. The economic environment is conducive to a stable economy. A conducive social environment from a harmonious surrounding community. The political environment is conducive, safe and does not affect the child-friendly school program.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut berupaya sebagai komitmen nyata pemerintah untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Tujuan KHA adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, khusus untuk anak-anak sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

Oleh karena itu dalam pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), KHA perlu direalisasikan melalui tindaklanjut dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh pemerintah secara efektif. Salah satu program unggulan Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak, yang menjadi landasan hukumnya yaitu: Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konveksi Hak Anak dan *World Fit for Children* di tingkat Internasional, serta UUD 1945.

Produk Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten / Kota yang mempunyai sistem pembangunan

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk terjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus terintegrasi dalam perancangan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan pada setiap SKPD. Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA, melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan di kecamatan / kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diarahkan pada Konvensi Hak Anak. KHA memiliki 5 (lima) Klaster Hak Anak antara lain :

1. Klaster 1. Hak Sipil dan Kebebasan.
2. Klaster 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
3. Klaster 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
4. Klaster 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.
5. Klaster 5. Perlindungan Khusus.

Kelima klaster KHA tersebut merupakan indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak agar terpenuhinya pemenuhan hak anak. Sebab anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Oleh

karena itu pembinaannya dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Selain itu klaster-klaster tersebut dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) menjadi sebagai indikator yang memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak yang harus dimiliki setiap daerah untuk mendapatkan predikat KLA.

Pada tahun 2019 Kota Pekanbaru telah menerima Predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya, serta Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah terbagi dalam 5 kategori yaitu :

1. Kabupaten/Kota Layak Anak.
2. Utama.
3. Nindya.
4. Madya.
5. Pratama.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dengan itu dibentuklah Gugus Tugas KLA melalui Keputusan Walikota. Gugus Tugas KLA merupakan Lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas KLA beranggotakan dari unsur Eksekutif, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, Organisasi non pemerintah,

Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha. Tugas Pokok Gugus Tugas KLA yaitu:

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan KLA.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan KLA.
- c. Menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA.
- d. Menentukan fokus dan prioritas program / kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- e. Menyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja.
- f. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA.
- g. Memberikan asistensi dan pendampingan pada kecamatan dan kelurahan model.
- h. Menyiapkan naskah akademik peraturan daerah tentang perlindungan anak.
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di Tingkat Kota, Kecamatan, kelurahan model sesuai dengan Rencana Aksi yang ada.

Berdasarkan bahan advokasi KLA berisikan program-program dalam kebijakan Kota Layak Anak. Disini penulis akan memaparkan mengenai program-program dari Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana di Kota Pekanbaru pada klaster 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, seperti berikut:

1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)  
yaitu pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun) dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal.
2. Wajib Belajar 12 Tahun, yaitu partisipasi wajib belajar 12 tahun dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Sekolah Ramah Anak (SRA), yaitu sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Mulai dari RA/KB/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK
4. Rute Aman dan Selamat dari ke Sekolah (RASS), yaitu sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah
5. Ruang Kreatifitas Anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak, yaitu tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Dari program-program Kota Layak Anak pada klaste 4 yang telah dipaparkan, disini penulis fokus pada Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai salah satu program yang menjadi unggulan Kota Pekanbaru dan sebagai program dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk pendidikan di Kota Pekanbaru. SRA mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait

pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Persyaratan minimal SRA, antara lain adalah:

1. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya).
2. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
3. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
5. Sekolah Adiwiyata.
6. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran.
7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA), Program ini pada Kota Pekanbaru diformulasikan dan ditetapkan SK sebagai Sekolah Ramah Anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru melalui keputusan Walikota Pekanbaru. Pelaksana program sekolah ramah anak di Gugus Tugas KLA pada klaster 4 bagian pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, serta dari Sekolah Ramah Anak yaitu tim pelaksana SRA di setiap satuan pendidikan di Kota Pekanbaru. Setiap tahunnya sekolah di kota Pekanbaru di SK kan sebagai SRA. Jumlah Sekolah yang di SK kan setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel I.1 Jumlah sekolah yang sudah di SK kan setiap tahunnya mulai 2018. s.d tahun 2020.**

No	Tahun	Jenjang Pendidikan		Jumlah SD/MI & SMP/MTS
		SD/ MI	SMP/ MTS	
1	2	4	5	7
2.	2018	20	8	28
3.	2019	11	18	28
4.	2020	93	110	213
Jumlah		124	136	260
Jumlah sekolah yang di SK kan dari 2018 s.d 2020				

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

Pada tabel diatas dapat kita lihat sekolah yang di SK kan Sekolah Ramah Anak tahun 2020 terdiri SD/MI sebanyak 93 sekolah dan SMP/MTS Sebanyak 110 Sekolah. Disini Penulis hanya melakukan penelitian pada Sekolah Ramah Anak untuk tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru sebanyak Lima Sekolah Ramah Anak yang terdiri dari:

1. SD Negeri 80 Pekanbaru
2. SD Negeri 51 Pekanbaru
3. SMP Negeri 4 Pekanbaru
4. SMP Negeri 5 Pekanbaru
5. SMP Negeri 10 Pekanbaru

Penulis memilih pada jenjang pendidikan SD dan SMP karena merupakan jenjang pendidikan yang langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, untuk program sekolah ramah anak ini terdapat tim pelaksana Sekolah Ramah Anak (SRA) pada setiap satuan pendidikan, dimana setiap tim pelaksana SRA terdapat salah satu perwakilannya.

Program sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru sendiri sudah memiliki sumber dana, berdasarkan Rencana Aksi Daerah KLA Kota Pekanbaru untuk Gugus Tugas KLA Pada Klaster 4 Pendidikan sumber dananya berasal dari APBD. Dana APBD ini untuk Gugus Tugas KLA pada klaster 4 bagi pendidikan sebanyak 20%.

Setelah melakukan prasurvey ditemukan kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Program Sekolah Ramah Anaknya sebagai berikut : 1. Kota Pekanbaru masih menuju Kota Layak Anak, namun masih banyak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Berdasarkan pendapat dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Riau, Esther Yuliani Manurung, menilai jika Kota Pekanbaru saat ini masih menuju kota layak anak. Hal itu disampaikan Ester terkait tiga penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru pada peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

*"Pandangan saya masih menuju kota layak anak. Dan masih menuju ramah anak juga. Banyak kejadian yang belum mencerminkan layak dan ramah anak dengan banyak juga kejadian dalam kekerasan fisik dan verbal,"* cakup Ester. ([www.cakaplah.com](http://www.cakaplah.com)).

Berikut tabel dibawah ini mengenai bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan Sekolah di Kota Pekanbaru:

**Tabel. II.2 Bentuk Tindak Kekerasan yang Terjadi Dalam Lingkungan Sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2018 s.d 2020**

No.	Jenjang Pendidikan	Bentuk Tindak Kekerasan	Tahun			Jumlah
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SD	a. Bullying	1	0	0	1
		b. Perkelahian antar siswa	0	0	0	0
		c. Pelecehan seksual	1	1	1	3
		d. Tindak kekerasan oleh tenaga pendidik terhadap siswa	2	0	1	3
		e. Tindak kekerasan lainnya	0	0	0	0
		Jumlah kasus	4	1	2	7
2.	SMP	a. Bullying	0	1	1	2
		b. Perkelahian antar siswa	1	1	1	3
		c. Pelecehan Seksual	0	0	0	0
		d. Tindak kekerasan oleh tenaga pendidik terhadap siswa	0	2	1	3
		e. Tindak kekerasan lainnya	0	2	0	2
		Jumlah kasus	1	6	3	10

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

Dari tabel diatas dapat kita lihat dalam terciptanya sekolah ramah anak terdapat berbagai bentuk tindak kekerasan di sekolah banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMP di Kota Pekanbaru sebanyak. Seperti kasus *bullying* atau perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah 10 kasus dari tahun 2018 sampai

dengan 2019. Salah satu bentuk kekerasan yang penulis teliti yaitu *bullying*. Kasus Bullying di SMP Negeri 38 Kota Pekanbaru. Berdasarkan keterangan dari orang tua korban yang menyangkan peristiwa yang dialami F di Sekolah, ia menceritakan kesakitan yang dialami anaknya selama lima bulan bersekolah di SMPN 38 Pekanbaru.

Dari pengakuan anaknya kata dokter yang biasa dipanggil Lala itu, pemukulan dilakukan oleh 3 orang oknum siswa SMP N 38 Rejosari (MR, RY dan CL). Adegan dilakukan secara bergantian dan ada jeda dalam pemukulan tersebut. Ibu korban sempat dihubungi oleh anaknya usai kejadian minta dijemput karena sakit. Lala saat itu menceritakan bahwa dirinya sedang lagi ramai pasien. Karena kesibukan itu, paman korban menjemput keponakan ke sekolah. Dari sana diketahui anaknya mengalami patah hidung dan harus mendapat penanganan medis.

*"Saya langsung hubungi suami saya untuk melihat kondisi anak saya itu. Saya baru tahu dari suami kalau anak saya dilarikan ke RS Awal Bros Pekanbaru dan dilakukan tindakan operasi, kalau dilakukan operasi berarti emergency. Saya langsung ke Rumah Sakit, Saya tanya sama anak saya ternyata dia dipukul saat berlangsung pelajaran Seni Budaya (SBY). Gurunya ada di depan kelas. Proses belajar berlanjut. Dipukul pakai kayu, ditinju di bagian lengan, terakhir pakai dua tangan di jedot dekat meja. Tahunya patah hidung setelah dia berlari ke dalam WC,"* terang Lala. (beritariau.com)

Aksi keji yang dilakukan oleh 3 orang temannya itu katanya sudah acapkali terjadi. Bukan hanya sekali, selama 5 bulan MFA belajar mengajar bahkan anaknya sering di palak setiap hari. Kejadian ini kata Lala, terjadi pada hari Selasa (05/11/19). Pada hari itu langsung dilakukan tindakan operasi sampai hari Rabu (06/11/19). Kamis (07/11/19) dr Rosilawati resmi melaporkan kasus ini ke Polresta Pekanbaru. Menurut keterangan Kapolresta Pekanbaru AKBP

Nandang Mu'min Wijaya mengungkapkan, kasus bullying atau perundungan yang dialami FA, berawal dari bercanda. Kasus itu terjadi saat jam pelajaran berlangsung, Selasa (5/11/2019) pukul 11.00 WIB. (riauonline.co.id).

Kejadian ini sempat dilerai beberapa teman lainnya sehingga korban dan pelajar kembali duduk mengikuti pelajaran. Saat itu, ada guru di kelas tapi kurang memperhatikan karena memeriksa tugas dari peserta didik. Tak lama setelah itu, korban perundungan menelepon orangtua dan menceritakan apa yang terjadi. Korban lalu dijemput dan dibawa pulang ke rumah setelah orang tuanya menemui pihak sekolah. Kasus ini lalu dilaporkan orang tua korban ke Polresta Pekanbaru. Sebelum itu, orang tua korban mengaku menemui pihak sekolah tapi tak ada penyelesaian hingga berujung ke polisi. (liputan6.com)

Pihak kepolisian akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus *bullying* di SMP Negeri 38 Pekanbaru. Tidak lain adalah MH dan R, teman satu kelas korban. Tetapi polisi menegaskan tidak akan melakukan penahanan keduanya. Kapolresta Pekanbaru berjanji akan segera merampungkan berkas perkara kasus ini.

*"Tidak dilakukan penahanan karena keduanya masih di bawah umur. Ini sesuai dengan aturan hukum anak,"* imbuhnya (news.okezone.com)

Sumber dana dari program sekolah ramah anak ini dananya berasal dari APBD hal ini berdasarkan keterangan dari Ketua Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan berikut.

*“Mengenai sumber daya ya seperti pada sk yang kamu lihat sebelumnya dari APBD, untuk implementasinya disekolah bagaimana itu antara dinas pendidikan kota dan sekolah, karna jika di SD, SMP itu kedinas kota untuk seperti apa pembagiannya dana itu” Cakap ibu relly.*

SK tersebut merupakan nama sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak untuk tahun 2020 di Kota Pekanbaru. Mengenai berapa jumlah anggaran dana program sekolah ramah anak pada satuan pendidikan tidak jelas dalam pembagian anggarannya berapa persen. Tim pelaksana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut hanya mengatakan asal sumber dana tersebut.

Dalam melaksanakan program Sekolah Ramah anak (SRA), dalam kondisi covid 19 menjadikan kondisi Kota Pekanbaru mengalami PPKM, hal ini menyebabkan keadaan sekolah berubah, guru hadir disekolah menggunakan sift, berapa hari sekolah baru kesekolah sehingga terbatas dengan waktu. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga mengatur ketentuan belajar tatap muka di sekolah. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan dilakukan terbatas setelah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan.

Mengenai PPKM level 2 yang terjadi di Kota Pekanbaru dalam rapat evaluasi yang dipimpin Walikota Firdaus dan didampingi Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani itu. Salah satunya menyepakati untuk menambah jam belajar tatap muka, yang sebelumnya hanya 2 jam menjadi 4 jam.

*"Belajar tatap muka untuk waktunya diserahkan kepada daerah. Untuk penambahan waktu di sekolah dari 2 jam berubah waktu menjadi 4 jam," kata Walikota.(cakaplah.com)*

Walikota menerangkan bahwa waktu penambahan jam belajar menjadi 4 jam adalah total lama waktu di sekolah mulai dari masuk sekolah, proses belajar

mengajar, dan jam istirahat. Hal ini membuat terbatasnya tim pelaksana dalam program sekolah ramah anak ini karena waktu yang hanya 2-4 jam dan guru juga harus masuk dengan sifit bergantian. Sementara hanya sebagian sekolah saja yangizinkan tatap muka. Oleh karena itu Tim Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak disini memiliki keterbatasan sebab kondisi covid-19 saat ini tidak bisa terlibat secara langsung.

Berdasarkan Panduan Sekolah Ramah Anak, Tim Pelaksana Internal Satuan Pendidikan antara lain:

1. Pembina
2. Penanggungjawab
3. Ketua pelaksana
4. Ketua bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak
5. Ketua bidang pengwasan kesehatan dan lingkungan
6. Ketua bidang kordinasi dan sosialisasi
7. Ketua tim monitoring dan evaluasi

(Sumber: KPPPA, 2015)

Susunan Tim pelaksana SRA pada satuan pendidikan terdiri yang pasti adalah pembina yaitu dinas pendidikan, penanggungjawab Kepala Sekolah. Tim Pelaksana SRA ini anggota lainnya adalah kewenangan kepala sekolah untuk menyusunnya.

Selanjutnya setelah melakukan observasi penulis menemukan berbagai fenomena yang terjadi dilapangan yaitu :

1. Belum optimal tercapainya pemenuhan hak anak yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan di sekolah seperti, aksi *bullying* atau perundungan antar siswa masih terjadi di SMP Negeri Kota Pekanbaru.
2. Kurang adanya transparansi berapa anggaran sumber dana untuk program sekolah ramah anak pada satuan pendidikan SD dan SMP di Kota Pekanbaru.
3. Terbatasnya keterlibatan Tim Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak disekolah secara langsung karena virus Covid 19, sebagian sekolah belajar tatap muka dengan waktu terbatas dan sebagian sekolah belajar dari rumah.

Berdasarkan fenomena dilapangan maka penulis ingin meneliti lebih lanjut judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru).**

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru).

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini memberikan sumbangan teoritis terhadap khazanah keilmuan Administrasi Publik, kajian pendidikan dan anak. Tentang pentingnya mengintegrasikan pemenuhan hak-hak anak di sekolah.
2. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal-hal yang baru selama ini belum dapat perhatian.
3. Manfaat praktis penelitian ini adalah agar menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan serta mengembangkan kajian kebijakan Kota Layak Anak studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka menguraikan teori-teori dalam penelitian dan juga landasan teori dalam penelitian, agar terlihat jelas dimana kaitan pengetahuan yang lebih dulu ada. Sangat penting disini sebuah ide pada bahan-bahan pustaka yang cocok dengan topik permasalahan yang diteliti. Supaya pembaca mendapat wawasan melalui tujuan dan hasil penelitian. Maka teori-teori yang digunakan antara lain:

##### 2.1.1. Administrasi Publik

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafri, 2012;9) administrasi menjadi kesesuaian tahapan kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilandasi oleh sesuatu logika khusus berguna untuk pencapaian tujuan yang ditentukan lebih dahulu.

Administrasi menurut Silalahi (dalam Zulkifli, 2009;11) merupakan kerja tim atau satu kelompok orang-orang dari pembagian tugasnya diatur dari bagan kelompok tersebut disesuaikan sumberdaya yang ada agar berguna dan praktis.

Serangkaian unsur sangat diperlukan agar tujuan administrasi tercapai. Menurut Syafri (2012;11-13) unsur-unsur administrasi meliputi:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi

4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan masyarakat

Menurut Gordon (dalam Andry, 2015;14) Administrasi negara harus melibatkan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi.

Thoaha (2008;34-36) mengemukakan ciri-ciri yang dimiliki administrasi negara terhadap suatu pemahaman yang dapat diterima antara lain:

1. Pelayanan administrasi negara didasari atas mana yang lebih penting didahulukan.
2. Pelayanan administrasi negara cenderung bersifat khusus merujuk pada satu organisasi saja.
3. Pelayanan administrasi negara diperuntukkan bagi masyarakat dengan dilandasi perundangan dan regulasi.
4. Pelayanan administrasi negara tidak terpengaruh dari keuntungan dan kerugian.
5. Upaya-upaya administrasi negara dipengaruhi dari penglihatan secara langsung.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerja sama keseluruhan pihak yang terkait pada pelayanan yang

diberikan dari negara kepada masyarakatnya dan memiliki landasan hukum yang sah.

### **2.1.2. Organisasi Publik**

Organisasi menurut Siagian (2008;6) merupakan hubungan kerjasama yang terbilang resmi yang memiliki tingkatan struktur antara anggotanya. Sedangkan James D. Money mengemukakan bahwa semua orang berkumpul demi tujuan bersama (dalam Zulkifli, 2005;99)

Menurut Chester I. Banard (dalam Zulkifli, 2015;99) organisasi sudah menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Blake dan Mouton (dalam Thoha, 2008;168) mengemukakan unsur-unsur yang erat dalam organisasi terbagi menjadi tujuh unsur berikut ini:

1. Adanya tujuan dari organisasi.
2. Tersedia sebuah struktur dalam organisasi.
3. Sumber pendanaannya tersedia.
4. Diajarkan untuk menjadi cepat tanggap meraih tujuan organisasi.
5. Terjalannya ikatan kerjasama meraih tujuan.
6. Kehidupan organisasi berdasarkan bentuk kultur.
7. Memiliki pencapai-pencapaian yang ingin dituju.

Menurut Davis (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;74) ada tiga tujuan organisasi antara lain:

1. Tujuan Primer, harga hemat bagi masyarakat memperoleh barang dan jasa.
2. Tujuan Kolateral, harkat-harkat yang baik untuk kepentingan umum.

3. Tujuan Sekunder, harga ekonomis agar berjalan dengan baik pencapaian suatu tujuan.

Tolak ukur berjalannya organisasi merupakan sebuah prinsip, menurut Syamsi (1994;14) prinsip-prinsip dari organisasi ialah sebagai berikut:

- a. Perumusan tujuan dengan jelas (*formulation of the objectives*) Pembagian tugas pekerjaan (*division of works*)
- b. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (*delegation of authority and responsibility*) Banyaknya tingkat hierarkis (*level of hierarchy*)
- c. Rentangan pengawasan (*span of control*)
- d. Memahami akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan (*understanding by the individual of his own task and the task of the whole*)

Menurut Fahmi (2013;1) organisasi publik sebagai tempat melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan semua orang dalam organisasi termasuk pemiliknya.

Organisasi publik menurut Stephen P. Robbins merupakan masyarakat yang utuh di selaraskan dengan secara *continue* agar tujuan semua orang tercapai (dalam Fahmi, 2013;2).

Dari defenisi yang telah dipaparkan disimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang berhubungan satu sama lain memiliki tugasnya masing-masing dan bekerjasama mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. serta dapat disimpulkan Organisasi Publik adalah sebuah tempat untuk melakukan usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari satu orang hingga orang banyak.

### 2.1.3. Manajemen Publik

Haiman (dalam Zulkifli, 2015;5) mengemukakan manajemen merupakan Aktivitas yang dikerjakan orang lain sebagai alat mencapai tujuan dengan melakukan evaluasi proses dari tiap orang.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2012;1) manajemen merupakan pengoptimalan semua sumber daya dengan berdayaguna dan praktis untuk meraih sebuah tujuan.

Stoner dan Wankel (dalam Pasolong, 2014;82) manajemen merupakan sebuah tahapan proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian bagaimana organisasi dan semua pengguna sumber daya organisasi lainnya hingga tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi manajemen menurut G. R. Terry (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015; 11) adalah *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan).

Manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008;93) merupakan keseluruhan usaha dan penggunaan sumber daya untuk menjamin bergeraknya organisasi supaya tujuannya tercapai.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah langkah-langkah memanfaatkan berbagai sumber daya agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen Publik sendiri dapat disimpulkan merupakan cara terlaksananya tujuan dari sebuah kebijakan, program untuk masyarakat yang telah disetujui bersama.

#### 2.1.4. Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian upaya-upaya yang dilakukan dalam kebijakan dan terdapat pada kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Sedangkan Menurut Frederickson dan Hart (dalam Tangkilisan, 2003;19) kebijakan merupakan usaha menuju tujuan yang digaungkan baik personal, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan khusus seiring dengan kendala-kendala yang muncul bersamaan peluang yang didapatkan demi tercapainya target atau tujuan yang mau dicapai.

Jenkins (dalam Agustino, 2016;17) mengemukakan kebijakan publik merupakan kaitan dari semua ketetapan-ketetapan yang ada. Menurut Mustopadidjaja (dalam Tahir, 2014;21) mengemukakan bahwa sebutan kebijakan biasanya berasal keputusan yang ditetapkan tertuang dalam peraturan dan selalu erat dengan aktivitas pemerintah lalu watak negaranya.

Menurut Rousseau kebijakan publik sebenarnya adalah komitmen dari kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pemilik *power* mengenai syarat yang diperlukan dalam peraihian tujuan semua orang (dalam Nugroho, 2003;59).

Kebijakan Publik haruslah berasal dari aspirasi masyarakat mau dari organisasi pemerintahan atau swasta terlepas ada hal-hal lain yang mesti dilakukan, lebih dahulu ada beberapa tahap yang ditetapkan sebuah kebijakan. Nugroho (2003;73) mengemukakan terbaginya tiga tahap dari kebijakan publik sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan

## 2. Implementasi Kebijakan

### 3. Evaluasi Kebijakan

Keban (dalam Tahir, 2014;20) mengemukakan kebijakan publik bisa dianggap barang, rangkaian, struktur dengan yang rancangan yang wajar kebijakan merupakan prinsip-prinsip, keadaan yang nyaman, dan bisa dibidang keseluruhan hasil akhir yang akan dibawa. Bernegosiasi apa topik-topik diangkat dan cara pelaksanaannya.

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Publik merupakan tindakan-tindakan yang lahir dari suara masyarakat sebagai jalan pemerintah atau penguasa menanggapi kondisi dan kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.5. Implementasi kebijakan**

Implementasi merupakan sebuah alat yang berguna sebagai sarana dalam wujud suatu tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ingin capai (dalam Sudarsono, 2005;89).

Sedangkan menurut Gunn dan Hoogod Implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial (dalam Wahab, 2008;61).

Afan Gaffar (2009;295) mengemukakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016;128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan dengan model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan istilah “*A Model of The Policy Implementation*”. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (dalam Agustino, 2016;133)

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016;133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, antara lain :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di

tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

## 2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

## 3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal

ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan semakin besar pula agen yang dilibatkan.

#### 4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

#### 5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,



dengan memperhatikan apa-apa saja yang bisa mendukung dalam mencapai tujuan utama yang disepakati.

## **2.1.6. Kota Layak Anak (KLA)**

### **2.1.6.1. Pengertian Kebijakan KLA**

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pendoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

### **2.1.6.2. Tujuan KLA**

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

### 2.1.6.3. Indikator KLA

Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Indikator Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari 6 bagian, yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 kluster hak anak, antara lain:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
5. Perlindungan Khusus

### 2.1.6.4. Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup KLA

Prinsip KLA adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:
  - a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
  - b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Adapun ruang lingkup kebijakan KLA, yaitu :

- a. Pembangunan dibidang Hak Sipil dan Kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan social, lingkungan hidup, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

#### **2.1.6.5. Gugus Tugas KLA**

Gugus tugas KLA di daerah ditetapkan melalui keputusan walikota. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Anggotanya meliputi perangkat daerah dan perwakilan anak. Tujuan Gugus Tugas KLA di daerah antara lain:

- a. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan penyelenggaraan KLA.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan penyelenggaraan KLA.
- c. Melakukan pelaporan terhadap pengembangan penyelenggaraan KLA di daerah kepada walikota.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kota layak anak merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berbagai bidang oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, supaya anak dapat terpenuhi hak-haknya.

### **2.1.7. Sekolah Ramah Anak**

#### **2.1.7.1. Pengertian Program SRA**

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu program dari Kebijakan Kota Layak Anak yang berada pada Klaster 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Program Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

#### **2.1.7.4. Prinsip SRA**

Pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Non diskriminasi yaitu setiap anak memiliki hak berupa hak anak yang untuk pendidikan yang sudah terjamin dapat dinikmati oleh anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi dari disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan juga latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu ketika mengambil keputusan pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berhubungan dengan anak didik mesti menitik berat pada kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu terciptanya kondisi lingkungan yang bersifat menghormati martabat anak dan bisa menjamin saat pengembangan holistik dan terintegrasi pada masing-masing anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.
5. Pengelolaan yang baik, yaitu segala sesuatu harus terjamin dari transparansinya, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

#### **2.1.7.4. Komponen SRA**

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting dibawah ini :

1. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA.
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak.
4. Sarana dan Prasarana yang ramah anak.
5. Partisipasi Anak, Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Dari defenisi diatas dapat ditakrik kesimpulan sekolah ramah anak merupakan salah satu upaya terpenuhinya pemenuhan hak anak di sekolah pada setiap jenjang pendidikan dalam pengembangannya didasari oleh prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak.

## 2.2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel peneliti beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian ini digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

**Gambar II.2. Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru)**



(Hasil : Modifikasi Penulis 2021)

### 2.3. Konsep Operasional

Untuk tidak hilangnya pemahaman tentang konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi Publik merupakan kerja sama keseluruhan pihak yang terkait pada pelayanan yang diberikan dari negara kepada masyarakatnya dan memiliki landasan hukum yang sah.
2. Organisasi Publik merupakan sebuah tempat untuk melakukan usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari satu orang hingga orang banyak.
3. Manajemen Publik merupakan cara terlaksananya tujuan dari sebuah kebijakan, program untuk masyarakat yang telah disetujui bersama.
4. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pada berbagai bidang supaya pemenuhan hak anak dapat terpenuhi.
5. Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan sebuah kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memperhatikan apa-apa saja yang bisa mendukung dalam mencapai tujuan utama yang disepakati.
6. Tujuan dan Ukuran Kebijakan merupakan bagaimana tujuan kebijakan tersebut dapat berhasil jika dapat dilaksanakan pada masyarakat.
7. Sumber Daya adalah pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil jika sumber daya manusianya berkualitas, tersedianya sumber daya keuangan dan kesesuaian sumber daya waktu.

8. Karakteristik Agen Pelaksanan merupakan mengamati organisasi yang terlibat dalam ruang lingkup implementasi kebijakan untuk menentukan ciri-ciri orang seperti apa yang cocok menjadi pelaksana kebijakan tersebut.
9. Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana merupakan seberapa pemahan para pelaksana kebijakan, diterima apa tidak diterimanya kebijakan dari pemerintah tersebut oleh para pelaksana.
10. Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas pelaksana adalah komunikasi yang tepat dan akurat, koordinasi yang baik. kesalahan akan semakin sedikit jika komunikasi antara pelaksana kebijakan yang satu dengan yang lain berjalan baik.
11. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik adalah lingkungan yang baik untuk pelaksanaan kebijakan dilihat dari lingkungan ekonomi yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan hidup pelaksanaan kebijakan, lingkungan sosial dari pandangan masyarakat, dan lingkungan politik yaitu pandangan pemerintah.

#### **2.4. Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel. Secara lebih detail operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table II.1 Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru)**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (dalam Agustino, 2016;133)	Implementasi Kebijakan terbagi menjadi 6 variabel menurut Van Horn dan Van Metter (dalam Agustino, 2016;133-136)	1. Tujuan dan ukuran kebijakan  2. Sumber daya  3. Karakteristik agen pelaksana	a. Keberhasilan implementasi kebijakan b. Kesesuaian ukuran implementasi kebijakan dengan kenyataan c. Tercapai Tujuan kebijakan  a. Tersedianya sumber daya manusia b. Tersedianya sumber daya finansial c. Tersedia sumber daya waktu  a. Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kebijakan b. Ciri-ciri agen pelaksana yang cocok c. Ruang lingkup implementasi kebijakan

1	2	3	5
		<p>4.Sikap atau kecenderungan (<i>disposition</i>) para pelaksana</p> <p>5.Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana</p> <p>6.Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik</p>	<p>a.Pemahaman kebijakan oleh para pelaksana</p> <p>b.Sikap penerimaan agen pelaksana kebijakan</p> <p>c.Sikap Penolakan agen pelaksana kebijakan</p> <p>a.Komunikasi yang tepat dan akurat</p> <p>b.Koordinasi yang baik</p> <p>c.Komunikasi yang baik</p> <p>a.Kondusifnya lingkungan eksternal ekonomi</p> <p>b. Kondusifnya lingkungan sosial</p> <p>c. Kondusifnya lingkungan politik</p>

Sumber: Modifikasi penulis, 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian dengan metode Kualitatif-Deskriptif. Metode penelitian seperti ini memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi di masa sekarang (Moleong, 2007;21) berguna Tipe penelitian seperti ini untuk memberi gambaran dari fenomena-fenomena yang terjadi. Sugiyono (2012;9) mengemukakan metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang sering disebut metoden naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Tipe penelitian deskriptif disini menurut Sugiyono (2016;11) merupakan penelitian jenis ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Dari sini peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru) bertujuan agar peneliti dapat memahami fenomena sosial dari gambaran lengkap dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan pada SD dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru yang di SK kan Sekolah Ramah Anak (SRA) tahun 2020. Penulis memilih Kota

Pekanbaru karena Pekanbaru menjadi Kota percontohan untuk Kabupaten/Kota lain diluar provinsi Riau. Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu berkunjung ke Kota Pekanbaru, untuk belajar kiat-kiat menjadi Kota Layak Anak seperti yang disematkan kepada Kota Pekanbaru.

Lokasi penelitian di SD dan SMP Negeri yang di SK kan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini sebagai perwakilan dari tim pelaksana SRA untuk Sekolah Ramah Anak. Kemudian lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai perwakilan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program SRA, tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak pada klaster 4 bagian pendidikan.

Selain itu pada masa pendemi Covid-19 sekolah tidak semua belajar dengan hadir kesekolah sebagian hanya dari rumah saja melihat yang terjadi, Oleh karena itu peneliti begitu tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru).

### **3.3. Informan dan Key Informan**

#### **3.3.1. Informan**

Informan penelitian ini adalah Perwakilan Tim Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak di SD dan SMP Negeri yang di SK Kan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru. Informan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel. III.1. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Sekolah SD SRA di Kota Pekanbaru	2 orang
2.	Guru SMP SRA di Kota Pekanbaru	1 orang
3.	Waka kesiswaan SMP SRA di Kota Pekanbaru	1 orang
4.	Humas SMP SRA di Kota Pekanbaru	1 orang
Jumlah		6 orang

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021)

Key Informan yang biasa dikatakan informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai subjek penelitian yang akan kita kontak dan wawancarai secara langsung.

#### **3.4. Teknik Penarikan Informan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan informan dengan *Snowball Sampling* bersamaan dengan *Purposive sampling*. *Snowball Sampling* sendiri menurut Sugiyono (2016;300) merupakan teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit namun lama-lama mejadi besar. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah SD, Waka Kesiswaan SMP, Guru SMP dan Humas SMP. Sebagai masing-masing perwakilan pelaksana untuk sekolah ramah anak, *purposive sampling* disini digunakan karena informan tersebut mengetahui informasi mengenai pelaksanaan program sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri yang di SK kan Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru.

Kemudian peneliti juga menggunakan teknik penarikan informan dengan *Purposive Sampling*. Sugiyono (2016;218-129) mengemukakan bahwa *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud ketika orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang fenomena penelitian kita atau orang yang informasinya sudah bisa mewakili. Key Informan atau Informan Kunci penelitian ini yaitu Ketua Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan merupakan Organisasi Perang Daerah yang menjadi salah satu anggota Gugus Tugas KLA untuk pelaksana Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder diantaranya:

#### **3.5.1. Data Primer**

Data primer menurut Sugiyono (2016;156) merupakan sumber daya yang langsung diberikan kepada pengumpul datanya. didapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. yang penulis kumpulkan berupa observasi dilapangan dan wawancara secara langsung dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan semua informan dan Key Informan penelitian untuk program sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru.

### 3.5.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016;156) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul datanya. Berguna sebagai data pelengkap terhadap data primer, data sekunder ini akan diperoleh dari literatur-literatur, peraturan-peraturan dari Kebijakan Kota Layak Anak, Panduan Sekolah Ramah Anak, Bahan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan Dokumentasi Foto Wawancara.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014;224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data .Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder. Penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara, observasi. Serta data sekunder dari jurnal-jurnal, artikel, literatur-literatur, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan juga merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu :

#### 3.6.1. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara menurut Sugiyono (2016;317) wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Serta mewawancarai 5 perwakilan tim pelaksana program sekolah ramah anak di 5 sekolah yang di SK kan Sekolah Ramah Anak

terbagi pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru dan 1 Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru perwakilan dari Dinas Pendidikan.

### **3.6.2. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berbagai fenomena yang sedang diteliti secara langsung yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Layak Anak. (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru). Observasi menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2016;166) merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

### **3.6.3. Dokumentasi**

Sugiyono (2016;240) mengungkapkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Berguna sebagai pelengkap, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, catatan-catatan, gambar-gambar yang penting dan berhubungan dengan data-data untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

## **3.7. Teknik Analisa Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan kemudian masuk pada tahap analisa data seperti menurut Sugiyono (2016;244) mengemukakan analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan,

dokumentasi, gambar atau foto dan yang lainnya. Data penelitian kualitatif dalam menganalisisnya harus melewati tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sedekimian rupa sehingga hasil dapat ditemukan.

2. Penyajian Data

Setelah kegiatan pengumpulan data sudah selesai dilakukan kemudian disusun dari sana kita bisa sekiranya mengambil kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis kualitatif, hasil penarikan kesimpulan yang dilakukan dapat berguna sebagai acuan dalam mengambil tindakan.

### **3.8. Uji Keabsahan Data**

Peneliti disini menggunakan uji keabsahan data dengan triangulasi teknik seperti berikut:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah mengecek kredibilitas data dengan cara mengecek sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggabungkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai mana metode kualitatif yang peneliti gunakan. Peneliti pertama-tama mendatangi tempat penelitian, mengamati sarana sekolah ramah anak, informan dalam

interkasi untuk mengetahui aktifitas Sekolah Ramah Anak dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Observasi, Kegiatan observasi dilakukan saat melakukan prasurvey selama satu bulan dan saat penelitian berlangsung selama satu bulan.
2. Wawancara, peneliti melakukan wawancara di jengkal pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru yang sudah di SK kan sekolah ramah anak sebanyak 5 informan dan yang diwawancara di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 1 informan.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini terdapat dokumentasi data mentah dan data olahan yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, serta Dokumentasi foto saat melakukan penelitian di SDN 80 Pekanbaru, SDN 51 Pekanbaru, SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru dan SMPN 5 Pekanbaru. Lalu dokumentasi dokumen, foto di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

### 3.9. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian dibawah ini :

**Tabel III.2. Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak Anak di Kota Pekanbaru (Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru)**

N O	Kegiatan	Bulan Minggu ke Tahun 2020-2021																							
		Novemb er- Desembe r				Januari- Februari				Maret- April				Mei-Juni				Juli- Septemb er				Oktober- Novemb er			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2.	Seminar UP					■	■	■	■																
3.	Revisi UP									■	■	■	■												
4.	Riset													■	■	■	■								
5.	Penelitian Lapangan													■	■	■	■								
6.	Pengelolaan Analisis Data																	■	■	■	■				
7.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
8.	Ujian Skripsi																								
9.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					■	■	■	■
10.	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																								■

Sumber : Modifikasi penulis 2021

### **3.10. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir**

Pada bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian definisi konsep dan teori-teori yang menyangkut studi perpustakaan dan dilanjutkan dengan kerangka pikiran dan konsep operasional dan operasional variabel.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Metode penelitian berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penarikan informan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, jadwal dan waktu kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

#### **Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada bab ini berisikan sejarah singkat lokasi penelitian, fungsi dan tugas organisasi, informasi yang relevan dengan judul penelitian.

#### **Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini berisikan identitas responden serta hasil penelitian dan pembahasan.

#### **Bab VI Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Kota Baru yang secara otomatis menjadi daerah otonomi melalui Penetapan oleh Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956. Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota provinsi Riau pada tahun 1958 oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota pekanbaru sudah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan, migrasi, dan urbanissi yang tinggi tidak heran Kota Pekanbaru menjadi ibukota terbesar di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru memiliki sarana dan fasilitas pendidikan, yang tersedia dari beraneka jenjang pendidikan formal, seperti berikut:

1. SD /MI swasta atau negeri sebanyak 456 sekolah.
2. SMP/MTS swasta atau negeri sebanyak 300 sekolah.
3. SMA swasta atau negeri sebangak 90 sekolah.
4. MA swasta atau negeri sebanyak 34 sekolah.
5. SMK swasta atau negeri sebanyak 56 sekolah.
6. Perguruan tinggi sebanyak 70 perguruan tinggi.

Kota Pekanbaru saat ini sedang menuju Kota Layak Anak. Program-program pendidikan dalam menuju KLA salah satunya Sekolah Ramah Anak, Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan. Sekolah yang sudah menerapkan SRA berjumlah sebanyak 357 dari

semua jenjang pendidikan kecuali perguruan tinggi. Terdapat beberapa sekolah sudah Ramah Anak di Kota Pekanbaru diantaranya seperti berikut:

1. SD Negeri 51 Pekanbaru
2. SD Negeri 80 Pekanbaru
3. SMP Negeri 10 Pekanbaru
4. SMP Negeri 4 Pekanbaru
5. SMP Negeri 5 Pekanbaru

Peneliti memilih di jenjang pendidikan SD dan SMP karena fenomena peneliti didominasi pada jenjang pendidikan tersebut. Selain ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak Pada Klaster Empat bagian pendidikan yang diwakilkan oleh Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu pelaksana program sekolah ramah.

#### **4.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

##### **4.2.1. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag selaku kepala operasi peramgkat daerah. Kantor Dinas Pendidikan beralamat di jalan H. Samsul Bahri Nomor 8, di Kelurahan Sungai Sibam pada Kecamatan Payung Sekaki.

##### **4.2.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

Visi dan Misi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru antara lain:

#### 1. Visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Membuat terwujudnya Dinas Pendidikan Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan yang berkualitas, dan madani menjadi rujukan nasional.

#### 2. Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

- a. Mewujudkan pelayanan prima dilingkungan Internal maupun eksternal organisasi.
- b. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu disemua jenjang pendidikan.
- c. Mewujudkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

#### **4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan**

Tugas pokok dan Fungsi dari Dinas Pendidikan dapat kita lihat sebagai Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Memastikan tercapainya indikator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
2. Memimpin dan mengkoordinasikan rapat bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
3. Memanfaatkan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

#### **4.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Kesiswaan SMP**

Fungsi yang terdapat di Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Tim Monitoring bertugas memonitoring segala kegiatan yang berhubungan dengan sekolah ramah anak di sekolah yang ditunjuk, dalam

melaksanakan tugasnya Tim Monitoring bertanggungjawan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Informan Penelitian

Identitas responden mempunyai kegunaan untuk mengetahui seberapa banyak Informan dari jenis kelamin, usia dan pendidikan. Hal tersebut agar dapat menggambarkan bagaimana keadaan informan yang ada pada penelitian ini sehingga dapat lebih jelas hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti. Agar lebih jelasnya tentang identitas informan penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. V.1 Distribusi Jenis Kelamin Informan Penelitian**

No.	Jenis Kelamin	Informan
1.	Laki-laki	1 orang
2.	Perempuan	5 orang
	Jumlah	6

(Sumber : Data Olahan Peneliti 2021)

Dari tabel V.I yang ada diatas bisa dilihat bahwa dalam penelitian ini informan penelitian yang terdiri dari para pelaksana di SD dan SMP Negeri yang di SK kan Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru dan pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Terlihat yang mendominasi ada pada jenis kelamin perempuan sebanyak 5 informan. Demikian jenis kelamin laki-laki hanya ada 1 informan.

Kemudian selanjutnya peneliti akan menjelaskan pembagian Informan berdasarkan umur. Mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

**Tabel V.2      Distribusi Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur**

No.	Umur	Informan
1.	30-39 Tahun	1
2.	40-49 Tahun	1
3.	50-59 Tahun	4
Jumlah		6

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel V.2 diatas tersebut dapat dilihat bahwa informan penelitian pada tingkat umur terbanyak dominasinya berada pada umur 50-59 tahun jumlahnya sebanyak 4 informan. Demikian dengan informan penelitian berdasarkan umur yang paling sedikit berada pada umur 30-39 tahun dan 40-49 tahun yaitu sama-sama jumlahnya sebanyak 1 informan.

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya sehingga bisa menggambarkan bagaimana keadaan informan penelitian dari tingkat penelitiannya. Demikian dapat dilihat berdasarkan tabel distribusi dibawah ini:

**Tabel V.3 Distribusi Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Informan
1.	Strata Satu (S1)	4
2.	Pasca Sarjana (S2)	2
Jumlah		6

(Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel V.3 yang tertera diatas bisa kita melihat bahwa pada informan penelitian didominasi pada tingkat pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 4 informan. Sedangkan untuk jumlah responden terkecil berdasarkan tingkat pendidikannya berada pada tingkat pendidikan Pascasarjana (S2) berjumlah sebanyak 2 informan.

**Tabel. V.4 Nama dan Identitas Informan**

No.	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Erma Susilawati	41	S1	Kasi Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Perempuan
2.	Nurbaiti Yusuf	58	S2	Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru	Perempuan
3.	Sarkani	51	S1	Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru	Laki-laki
4.	Tuty Indriati	55	S2	Humas SMPN 4 Pekanbaru	Perempuan
5.	Atiah Astuti	39	S1	Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru	Perempuan
6.	Asti Rusti	53	S1	Guru SMPN 10 Pekanbaru	Perempuan

(Sumber: Data Olahan Peneliti,2021).

## 5.2. Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab ini yaitu hasil dan pembahasan akan dilakukan pemaparan hasil penelitian sekaligus dilakukan juga pembahasan dari tanggapan informan penelitian yang terdiri dari para pelaksana program sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan SD dan SMP negeri di Kota Pekanbaru, dan Kasi Kesiswaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil serta pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut:

### 5.2.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

#### a. Jenjang Pendidikan SD

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara untuk ukuran dan tujuan kebijakan yaitu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), program sekolah ramah anak sudah terimplementasi dengan berhasil antara pelaksanaanya disekolah seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru Ibu Nurbaiti Yusuf,

*”Di dalam penerapan program sekolah ramah anak ini untuk SD sebenarnya amat-amat sangat mudah jika memang betul-betul bekerjasama antara guru, murid, orang tua dan wali murid.”* cakap ibu Nurbaiti Yusuf.

Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru Ibu Nurbaiti Yusuf, bahwa wujud terimplementasinya program sekolah ramah anak ini dari kerjasama semua pihak terkait dari tenaga pendidik hingga orang tua peserta didik. Setiap kegiatan dari lomba, sosialisasi maupun pelatihan mengenai sekolah ramah anak semuanya ikut andil.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 51 Kota Pekanbaru mengenai standar yang digunakan untuk program sekolah ramah anak.

*“Tim pelaksana juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi untuk menjang program sekolah ramah anak salah satunya dari dinas pendidikan memakai panduan SRA ini dari DPKPA”* Kata Bapak Sarkani

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sarkani Kepala Sekolah SDN 51 Kota Pekanbaru, bahwa standar yang digunakan dalam program sekolah ramah anak sudah ini yaitu berupa Panduan yang digunakan di SD berasal dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPKPA). selain panduan sekolah ramah anak dari KPKPA sebagai standarnya, sekolah boleh menggunakan referensi pendukung lainnya seperti buku Pedoman Sekolah Ramah Anak, Peraturan Seputar Perlindungan Anak, Peraturan kebijakan kota layak anak sebagai penambah pengetahuan untuk para pelaksana sekolah ramah anak ini.

Tujuan dari kebijakan Kota Layak Anak sudah tercapai untuk Studi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti Yusuf selaku Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru.

*“Mengenai tujuan tentu sudah ya, bisa kita lihat program-program disekolah ini terlaksana program satu dengan yang lain saling terintegrasi sudah tercapai disekolah salah satunya dari sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah sahabat keluarga, sekolah sahabat keluarga juga agar kita bisa mencegah tindak kekerasan dirumah kita menjalin hubungan baik juga dengan orang tuanya”* ungkap Ibu Nurbaiti.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru bahwa mengenai tujuan kebijakan sudah tercapai dilihat dari terlaksana program-program yang saling berkaitan dengan Program Sekolah Ramah Anak, seperti Sekolah Dasar Bersih Sehat merupakan Sekolah Dasar yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat sehingga memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, sejuk, segar, rapih, tertib, aman, serta memiliki warga sekolah yang bersih dan sehat.

Selain itu ada Sekolah Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata sendiri merupakan Sekolah yang melaksanakan Program Adiwiyata yang bertujuan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Mengenai pencegahan tindak kekerasan di rumah dan di sekolah terdapat program sekolah sahabat keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas di SDN 80 Pekanbaru dan SDN 51 Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan Kota Layak Anak Studi Program Sekolah Ramah Anak ini sudah berhasil implementasinya di sekolah dengan kerjasama dari semua warga sekolah dari tenaga pendidik, Wali Kelas, Guru dan orang tua murid. Panduan dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak adalah panduan sekolah ramah anak dari KPPPA namun sekolah boleh mencari sebanyak-banyaknya buku-buku sebagai referensi. Agar tujuan program sekolah ramah anak terwujud sudah adanya upaya dari sekolah dengan melibatkan program-program lainnya seperti sekolah sehat dan sekolah sahabat keluarga. Agar terpenuhinya hak anak perlu kerjasama sekolah dan orangtua.

Berdasarkan hasil observasi di SDN 80 Pekanbaru dan SDN 51 Pekanbaru memang sudah dapat dikatakan berhasil program sekolah ramah anak ini di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Pekanbaru bisa kita lihat dari data jumlah sekolah ramah anak setingkat SD di Kota Pekanbaru berdasarkan data dari

DPPPA Kota Pekanbaru berjumlah paling banyak sebanyak 186 sekolah yang tergabung dengan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Sehubungan dengan pandemi Covid-19 saat ini mengharuskan anak lebih banyak dirumah. Tujuan program sekolah ramah anak yaitu agar tercapainya pemenuhan hak anak di sekolah kini memang fokus pada orang tua dan anak. Tujuan program ini dapat tercapai dengan kolaborasi program sekolah ramah anak dengan program sahabat keluarga sangat membantu untuk orang tua dan sekolah. Saling interaksi mengkomunikasikan kondisi anak dari orang tua dan guru.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas, dapat diinterpretasikan bahwa Ukuran Dan Tujuan Kebijakan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Sudah berhasil terimplementasi untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) tindak kekerasan disekolah mengalami penurunan.
2. Standar yang digunakan untuk program ini yaitu panduan sekolah ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3. Tujuan program ini sudah tercapai dengan terlaksananya program-program yang terintegrasi dalam program sekolah ramah anak.

## b. Jenjang Pendidikan SMP

Kemudian untuk program sekolah ramah anak ini pada jenjang pendidikan SMP sudah berhasil namun masih dalam proses seperti hasil wawancara berikut dengan Ibuk Tuty Indrianti selaku Humas SMPN 4 Pekanbaru.

*“Perlu dilakukan perbaikan, peningkatan pada beberapa bagian untuk melihat progres dimulai setelah murid sudah bersekolah beberapa tahun.”*ungkap Ibu Tuty

Dari hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru bahwa untuk melihat peningkatan program ini memerlukan waktu beberapa tahun dalam pelaksanaannya tidak bisa hanya satu tahun berjalan seperti peserta didik kelas 7 tidak bisa kita indentifikasi.

Hasil wawancara mengenai standar yang digunakan berdasarkan dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru Ibu Asti Rusti dapat kita lihat penerapannya seperti berikut.

*“Tergantung input secara umum itu proses, indikasi anak itu dilihat dari kelas 9 karna murid baru selalu masuk silih berganti maka tiap tahun pasti berbeda, pedoman yang kita gunakan ada dari dinas pendidikan semua sekolah memakai itu panduan sekolah ramah anak dari kementerian yang membidangi khusus anak begitu”* Kata ibu Asti Rusti saat ditemui di ruang kurikulum SMPN 10 Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru diatas bahwa untuk standar yang digunakan dalam program sekolah ramah anak jenjang pendidikan SMP adalah panduan sekolah ramah anak dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Panduan sekolah ramah anak ini terbit pada tahun 2015 dan memang diperuntukkan sebagai standar dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru Ibuk Atiah mengenai tujuan sekolah ramah anak yang aman, nyaman, bebas tindak kekerasan dan diskriminasi di SMP sebenarnya sudah tercapai.

*“Sekolah memberikan sosialisasi, pemberitahuan-pemberitahuan dan ajakan yang kita lakukan setiap setengah jam sebelum masuk kekelas itu sebelum pandemi, sekolah memberikan jaminan 8 jam anak ini disekolah, agar merasa aman, merasa nyaman, baik segi dalam saat melakukan pendidikan proses belajar mengajar itu berlangsung termasuk juga saat istirahat atau berkomunikasi dengan temannya.”*ungkap Ibu Atiah

Dari hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru diatas bahwa sudah ada upaya-upaya yang dilakukan disekolah untuk program sekolah ramah anak dengan upaya yang dilakukan seperti memberikan edukasi sebelum masuk kelas. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan, pemahaman kepada peserta didik khususnya.

Hasil wawancara dengan Ibuk Asti Rusti selaku Guru SMPN 10 Pekanbaru untuk tercapainya tujuan sekolah ramah anak sebagai berikut.

*“Kalau sekarang karna ada covid-19 sekolah mengundang orang kesekolah dengan anaknya, sama orang tua dulu kita bicarakan bagaimana kondisi anak ini apa ada masalah mungkin ada tugas yang tidak sama sekali dia kerjakan seperti tu, tapi anaknya siswa tidak ikut masuk keruangan. Karena anak biasanya ada orang tuanya akan lebih pendiam sulit untuk berkomunikasi. Setelah selesai dengan orang tua baru kita panggil anaknya kita kasih pengarahan.”*ungkap Ibu Asti

Dari hasil wawancara diatas dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru bahwa mengenai tujuan program sekolah ramah anak umumnya sudah tercapai pada jenjang pendidikan SMP dengan berbagai upaya dimulai dari peserta didik itu sendiri jika terjadi permasalahan atau kendala dari peserta didik. Orang tua lebih dahulu diberikan pengarahan, setelah itu baru peserta didiknya diruangan terpisah.

Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru, SMPN 5 Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang telah dipaparkan diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan kota layak anak studi program sekolah ramah anak sudah tercapai dengan berhasil namun masih proses, perlu peningkatan di beberapa sisi pada setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Pedoman Sekolah Ramah anak yang digunakan setiap sekolah termasuk pada jenjang pendidikan SMP memakainya sebagai pedoman wajib. Tercapainya tujuan sekolah ramah anak yang aman, nyaman bebas tindak kekerasan dan diskriminasi sebagai pemenuhan hak anak disekolah, upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi, pemberitahuan, pengarahan, dan komunikasi khusus pada orang tua dengan memanggil orang tua kesekolah setelah itu baru komunikasi khusus dengan anaknya saja.

Berdasarkan hasil observasi di SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru, SMPN 5 Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memang perlu perbaikan karena setiap tahun harus terus dipantau disamping murid yang silih berganti dan memerlukan waktu baru dapat diindikasikan saat sudah sampai dikelas Sembilan. Standar sekolah ramah anak memang semua sekolah menggunakan Pedoman Sekolah Ramah Anak dari KPPPA yang merupakan anjuran dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Upaya agar tercapainya tujuan program ini memang sangat penting peran sosialisasi sebuah program seperti program sekolah ramah anak agar baik peserta didik, tenaga pendidik dan orang tua memahami program SRA baru berjalan seiring waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Ukuran Dan Tujuan Kebijakan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Terimplementasi berhasil program sekolah ramah anak ini dengan terus dilakukan perbaikan.
2. Sudah tersedia standar untuk program ini berupa panduan sekolah ramah anak.
3. Tercapainya tujuan yang paling penting dari sosialisasi, setelah itu diarahkan, dikomunikasikan seperti apa pelaksanaan program sekolah ramah anak.

### **5.2.2. Sumber Daya**

#### **a. Jenjang Pendidikan SD**

Sumber daya untuk program sekolah ramah anak ini berasal dari adanya tim sekolah ramah anak pada setiap satuan pendidikan SD sudah tersedia sumber daya manusianya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru yaitu Ibuk Nurbaiti Yusuf berikut.

*"Tentu ada Tim setiap program disekolah ini ada timnya, saat sosialassi dari dinas pendidikan mereka kan melihat siapa yang berkompen nama itu kemudian direkomendasikan ke Kepala Sekolah dan dibentuk Tim, Tim ramah anak."*

Dari wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru sudah tersedia tim pelaksana sekolah ramah anak, pembentukan tim ini ada wewenang dari kepala sekolah untuk menyusun siapa-siapa saja yang menjadi anggota tim

ini. Meskipun demikian pembentukan tim pelaksana SRA ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Asal sumber dana untuk program ini disekolah sumber dananya berasal dari Dana Bos, namun bisa saja hanya menggunakan dana mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarkani selaku Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru berikut.

*“Untuk dana disekolah berasal dari Dana BOS karna sudah terbiasa tidak perlu dana lagi sudah berjalan sedemikian rupa kita memakai dana mandiri sekolah saja”.* Cakap Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru Bapak Sarkani.

Dari hasil wawancara diatas Dana Bos dapat digunakan untuk program sekolah ramah anak juga. Selain itu juga dapat menggunakan Dana mandiri disekolah, dana ini merupakan dana yang sudah ada disekolah dimanfaatkan.

Program ini dilakukan terus menerus, walau ada jangka waktu tetapi sekolah akan tetap terus-menerus melaksanakan program sekolah ramah anak.berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti Yusuf selaku Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru berikut.

*“Tidak ada jangka waktu disekolah terus menerus kami melakukan ramah anak itu diberikan edukasi mengenai ramah anak itu dari SD sampai kelas 6 untuk dilanjutkan lagi pada jenjang seterusnya.”* Ungkap Ibu Nurbaiti Yusuf.

Dari wawancara yang dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru diatas bahwa Jangka waktu untuk program sekolah ramah anak anak ini akan dilakukan terus menerus hingga sekarang dan berlanjut pada jenjang pendidikan berikutnya di implementasikan program tersebut.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tim pelaksana sekolah ramah anak sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak ini sudah ada Tim Pelaksana di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Sumber dana berasal dari Dana Bos, Dana Mandiri dari Sekolah. Jangka waktu program ini berfokus di sekolah, tidak ada jangka waktu dilaksana terus menerus hingga jenjang pendidikan selanjutnya.

Berdasarkan hasil observasi di SDN 51 Pekanbaru dan SDN 80 Pekanbaru sumber daya manusia berupa tim pelaksana program sekolah ramah anak pada setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar berupa tim pelaksana sudah ada namun tidak bergantung pada tim saja seluruh tenaga pendidik terlibat dalam pelaksanaan program ini. Sumber dana berasal dari APBD jika menurut undang-undang, namun disekolah dasar sendiri memakai dana sekolah seperti dana bos dalam pelaksanaan program ini pada awalnya menerima dana, ketika sudah berjalan program sekolah ramah anak ini sekolah hanya menggunakan dana yang sudah ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya meski tidak dipungkiri dana yang mencukupi akan mempercepat pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah yang menunjang program sekolah ramah anak. Jangka waktu tidak ada sekolah akan dilaksanakan terus menerus hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Sumber Daya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Sudah lengkap tersedia sumber daya manusia yaitu Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak di sekolah.
2. Sumber dana dari APBD namun lebih memanfaatkan dana yang tersedia disekolah saja.
3. Program ini jangka waktunya disekolah berkepanjangan terus menerus.

#### **b. Jenjang Pendidikan SMP**

Program sekolah ramah anak untuk jenjang SMP sumber daya manusianya adalah Tim Pelaksana sekolah ramah anak tapi tidak mengecualikan ini menjadi tugas bersama seluruh tenaga pendidik dan peserta didik disekolah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh perwakilan salah satu SMP di Kota Pekanbaru.

*“Program sekolah ramah anak ini di SMP 5 sudah terbentuk itu Tim sekolah ramah anaknya terdiri dari bapak, Ibu guru juga ya kita libatkan Osis disitu jadi kerja tim disekolah ramah anak ini memang sangat diperlukan.”* Kata Waka Kesiswaan Ibu Atiah dari SMPN 5 Pekanbaru.

Hasil wawancara di SMPN 4 Pekanbaru dengan Ibuk Tuty Indrianti selaku Humas SMPN 4 Pekanbaru mengenai sumber dana program sekolah ramah anak.

*“Dana sudah ada dari sekolah kita menggunakan Dana Bos.”*ucap Ibu Tuty.

Dikuatkan juga dengan Hasil Wawancara dengan ibu Asti Rusti Selaku Guru SMPN 10 Pekanbaru.

*“Kita disekolah sumber dananya ada dari pemerintah seperti dana Bos, dana dari CSR kita juga dapat di SMPN 10.”*ucap ibu asti.

Dari hasil wawancara diatas dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru bahwa sumber dana program sekolah ramah anak ini berasal dari Dana Bos dan Dana CSR, penggunaan Dana CSR diperbolehkan dikarenakan dunia usaha juga terlibat boleh berkontribusi salah satunya untuk pendanaan program sekolah ramah anak ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atiah Astuti selaku Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru.

*“Jangka waktu memperpanjang SK kembali itu boleh saja, tapi komitmen sekolah-sekolah yang sudah dapat SK itu bagaimana program ini bisa terus terlaksana gak, jadi untuk mengetahui apakah itu tetap berlanjut saya rasa diperlukan.”* Ungkap Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru.

Dari hasil wawancara Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru diatas bahwa jangka waktu program sekolah ramah anak ini sekolah memiliki komitmen untuk melaksanakannya hingga saat ini dari perpanjangan SK kembali membantu apakah program SRA tersebut berjalan apa tidak program tersebut disekolah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tim pelaksana sekolah ramah anak telah ada pada setiap satuan pendidikan di Kota Pekanbaru yang disusun oleh kepala sekolah. Sumber daya dana berasal dari Dana sekolah pada setiap satuan pendidikan rata-rata dari dana BOS, ada juga dana CSR dan sebagainya. Jangka waktu untuk pelaksanaan program ini penetapan oleh Walikota Pekanbaru satu tahun sekali. Pelaksanaan program sekolah ramah anak di sekolah tidak memakai jangka waktu program ini dilaksanakan secara terus menerus.

Berdasarkan hasil observasi di SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru dan SMPN 5 Pekanbaru bahwa sumber daya manusia berupa tim pelaksana

sekolah melalui penetapan SK Tim Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak pada satuan pendidikan. SMPN 5 Pekanbaru tidak bisa memperlihatkan SK tim pelaksanaannya karena pergantian kepala sekolah sulit menemukan file tersebut. Walaupun demikian untuk program sekolah ramah anak ini semua sekolah memiliki komitmen dari tenaga pendidik untuk melaksanakan program ini. Bukan hanya mengandalkan tim namun semua unsur yang ada di sekolah dilibatkan seperti organisasi OSIS. Sumber dana untuk mendanai program ini berasal dari sebenarnya APBD. Setiap satuan pendidikan memakai dana yang ada di sekolah sebab program sekolah ramah anak ini merupakan integrasi dari program-program yang sudah ada di sekolah sebelumnya tidak jauh berbeda. Jangka waktu yang ada sendiri tidak mempengaruhi pelaksanaan program sekolah ramah anak karena tujuan ramah anak ini sendiri memiliki *basic* yang sama bagaimana seharusnya kondisi di sekolah. Jangka waktu sendiri tidak memiliki pengaruh apapun sebab memang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Sumber Daya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Tersedia tim pelaksana Sekolah Ramah Anak dan melibatkan semua bagian dari sekolah itu sendiri.
2. Sumber dana berasal dari APBD namun di sekolah memakai Dana Bos dan Dana CSR.

3. Jangka waktu program sekolah ramah anak disini sekolah berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dilakukan hingga saat ini terus menerus.

### 5.2.3. Karakteristik Agen Pelaksana

#### a. Jenjang Pendidikan SD

Karakteristik agen pelaksana dari Program Sekolah Ramah Anak (SRA) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahwa Tim pelaksana SRA sudah ada keterlibatan dalam Program Sekolah Ramah Anak. Hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti Yusuf selaku Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru.

*“Namun untuk SD yang terlibat bukan hanya tim ramah anak saja akan tetapi menjadi tanggungjawab juga untuk seluruh tenaga pendidik, terutama disekolah yaitu wali kelasnya baik itu tindak kekerasan yang terjadi disekolah maupun dirumah, karna lagi covid juga nak terbatas keterlibatan tim ini waktu yang tidak menentu ya melihat keadaan dulu apa peserta didik sudah boleh tatap muka atau belum”* Ungkap Ibu Nurbaiti.

Dari Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru bahwa keterlibatan tim pelaksana program sekolah ramah anak saat ini memiliki keterbatasan dalam hal situasi virus Covid 19 saat ini sehingga peran orang tua sangat penting kerjasama antara sekolah dan orang tua. Karena peserta didik sebagian belajar daring adapun yang tatap muka sekolah yang memang diperbolehkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru Bapak Sarkani di ruang Kepala Sekolah.

*”Sebelum pandemi ya kalau ada sebuah masalah apakah itu masalah interen atau yang lain apalagi korelasinya dengan kekerasan pasti jika anak dikelas kita mendapat tindak kekerasan apakah dengan gurunya*

*yang melakukan kekerasan kesiswa, tindak kekerasan kesesama siswa atau sebaliknya siswa ke gurunya. Pertama kali itu wali kelas yang mencoba menyelesaikan dan juga dilakukan bimbingan konseling karena ada covid jadi peserta didik lebih sering dirumah maka itu kita sangat perlu memperkuat hubungan dengan orang tua, wali kelas memberikan pengertian dengan mendengarkan dan saling berkomunikasi kepada orang tua dengan penyampaianya yang baik mengenai anak mereka” Ungkap Bapak Sarkani.*

Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru bahwa sistematika keterlibatan sekolah saat terjadi tindak kekerasan disekolah sudah jelas mekanismenya namun karena kondisi saat ini sedang ada Covid 19 mengakibatkan waktu untuk tim pelaksana ini terbatas dalam keterlibatannya dengan peserta didik. Sehingga peran orang tua yang sangat diandalkan, maka itu sekolah dan orang tua berkolaborasi pertama-tama walikelas dengan orang tua hubungatnya harus kuat dengat mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik.

Kemudian mengenai Tim Pelaksana program SRA sudah sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erma Susilawati selaku Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Perwakilan Dinas Pendidikan untuk program sekolah ramah anak.

*“Jadi Begini Dinas Pendidikan pada saat sosialisasi program sekolah ramah anak memberikan rekomendasi siapa-siapa saja dari sekolah itu yang dipilih masuk kedalam tim sekolah ramah anak kemudian kita beri kewenangan pada kepala sekolah untuk menyusun tim itu.”*

Dari hasil wawancara diatas dengan Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Pekanbaru bahwa setiap dilakukan sosialisasi disekolah mengenai program sekolah ramah anak dari sana oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dari sana Dinas merekomendasi beberapa nama yang akan dimasukan sebagai tim

pelaksana sekolah ramah anak di sekolah tersebut. Kepala Sekolah sendiri yang memutuskan nama-nama siapa saja yang masuk dalam susunan tim pelaksana SRA dalam bentuk SK.

Ruang lingkup pada program berfokus pada pelaksanaannya pada lingkup sekolah. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru Ibu Nurbaiti Yusuf.

*“Dikatakan ruang lingkup kan begini sekolah ramah anak itu sebenarnya yang penting disekolah itu sendiri, lingkungan sekolah itu berada, lingkungan anak-anak itu berada melihat kondisi sekarang sekolah daring jadi sekolah itu banyak memberi arahan untuk orang tua, ini jadi tantangan juga untuk guru nak karena untuk komunikasi dengan orang juga bukan hal yang mudah.”*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru bahwa ruang lingkup program sekolah ramah anak ini berada pada lingkungan sekolah dimana program itu terlaksana karena kondisi yang belum pasti mengenai sekolah tatap muka ini, maka dari itu orang tua dan guru saling bekerjasama, peserta didik yang banyak dirumah lebih dipantau lagi oleh orang tua dan dengan arahan guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SDN 80 Kota Pekanbaru dan SDN 51 Kota Pekanbaru diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya semua tenaga pendidik terlibat saat terjadi kasus kekerasan disekolah. Namun tim pelaksana memiliki keterbatasan, sebab kondisi saat ini sedang ada virus Covid-19 membuat rata-rata sekolah belajar dari rumah dan hanya beberapa sekolah yang belajar tatap muka. Standar dalam menentukan tim berdasarkan hasil remodendasi dari Dinas Pendidikan kemudian disusun oleh Kepala Sekolah. Ruang lingkup program ini umumnya berfokus pada lingkungan sekolah dan dirumah karena anak menghabiskan waktu lebih banyak dirumah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 80 Kota Pekanbaru dan SDN 51 Kota Pekanbaru keterlibatan semua tenaga pendidik disekolah sangat efektif sebelum pandemi covid-19, karena di sekolah tidak selalu terpantau oleh tim sekolah ramah anak jadi semua tenaga pendidik berkewajiban terlibat terutama walikelas. Standar yang digunakan untuk membentuk tim sekolah ramah anak sudah ada ketika saat Dinas Pendidikan ke Sekolah untuk proses sosialisasi program sekolah ramah anak diusulkan lah beberapa nama ke Kepala Sekolah. Ruang lingkup program sekolah ramah anak di SD berfokus pada lingkungan sekolah itu sendiri dan dirumah.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Karakteristik Agen Pelaksana pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Tim Pelaksana SRA di sekolah terbatas keterlibatannya karena kondisi covid-19 mebuat sekolah rata-rata belajar dari rumah hanya beberapa sekolah saja yang diperbolehkan belajar tatap muka.
2. Standar dalam penyusunan tim pelaksana sekolah ramah anak disekolah dari rekomendasi dinas pendidikan.
3. Ruang lingkup program sekolah ramah anak hanya difokuskan dalam lingkup sekolah itu sendiri dan dirumah.

## b. Jenjang Pendidikan SMP

Tim Pelaksana dari program sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan SMP bahwa karakteristik tim sekolah ramah anak sebagai agen pelaksana bahwa adanya keterlibatan tim dalam persoalan terjadinya tindak kekerasan disekolah. Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru Ibu Atiah Astuti saat ditemui di lapangan SMPN 5 Pekanbaru.

*“Iya sangat, mereka sangat terlibat salah satunya dari mencari pokok permasalahan kalau untuk anggotanya keterlibatan mereka dari selalu mendampingi sampai ada jalan keluar sampai ditemukan sebuah mufakat itu kerjasama tim itu sebelum covid seperti itu kira-kira nak sekarang lebih kita bekerjasama dengan orang tua nak”* Ungkap buk Atiah

Dari hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru bahwa Keterlibatan Tim pelaksana sudah jelas keterlibatannya seperti apa, namun terdapat keterbatasan karena virus covid-19 untuk tim pelaksana SRA dan lebih berfokus kerja sama sekolah dan orang tua peserta didik.

Hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru Ibuk Tuty Indrianti di Aula SMPN 4 Pekanbaru.

*“Sudah terlibat pasti nak, seperti yang terjadi sekarang kondisi sekolah semua belajar daring dan baru-baru ini mulai bisa tatap muka waktu kita itu terbatas, timnya terbatas dan fokus kita karena anak belajar dirumah lebih intens lagi pendekatan kita ke orang tua dan peserta didik seperti itulah nak”*ungkap Tuty.

Dari hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru bahwa Tim pelaksana sudah ada terlibat memang akan tetapi terbatas keterlibatannya karena covid-19 sehingga waktu disekolah yang seharusnya 8 jam hari menjadi 2-4 jam saja, dimana orang tua yang lebih harus lebih banya terlibat dari biasanya.

Hasil wawancara dengan Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ibu Erma Susilawati sebagai perwakilan Dinas Pendidikan untuk standar tim pelaksana Program Sekolah Ramah Anak.

*“Kualifikasi untuk tim sekolah ramah anak ini minimal pendidikan nya S1 atau D4 untuk semua sekolah sama minimal S1, setelah itu kepala sekolah lah yang menyusun siapa-siapa saja anggotanya karena kepala sekolah di Pekanbaru itu udah ada pelatihan konvensi hak anak kita membahas juga mengenai program sekolah ramah anak ini.”* Ungkap Ibu Erma.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bahwa sudah sesuai saat ini tim pelaksana sekolah ramah anak yang ada dengan minimal pendidikan S1 rata-rata sudah, untuk semua jenjang pendidikan minimal D4 atau S1.

Ruang lingkup program sekolah ramah anak menurut pendapat Guru SMPN 10 Pekanbaru Ibu Asti Rusti berikut.

*“Itu dilakukan dalam lingkup sekolah, dari sampai pada komunikasi sekolah dengan orang tua jadi tidak hanya sekedar keamanan disekolah dalam bentuk keamanan dalam menuntut ilmu jadi tergantung sekolahnya apa ingin disekitar sekolah atau membangun komunikasi dengan orang tua dan anak dirumah”*ungkap Ibu Asti.

Dari hasil wawancara dengan Guru SMPN 10 Kota Pekanbaru bahwa ruang lingkup program sekolah ramah anak ini pada ruang lingkung sekolah bagaimana hubungan antara sekolah, orang tua, peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SMPN 10 Kota Pekanbaru, SMPN 4 Kota Pekanbaru dan SMPN 5 Kota Pekanbaru diatas dapat disimpulkan karakteristik agen pelaksananya bahwa tim pelaksana sekolah ramah anak memiliki keterlibat saat terjadi kasus tindak kekerasan disekolah dengan tidak membiarkan siswa itu sendiri dilakukannya pendampingan dari sekolah

diselesaikan dengan baik-baik. Standar pembentukan Tim sekolah Ramah anak ini minimal kualifikasi pendidikannya D4 (S1), bagi yang memiliki potensi dipilih oleh kepala sekolah. Ruang Lingkup program sekolah ramah anak lebih berfokus dengan sekolah bagaimana menjaga komunikasi antara sekolah, siswa dan orang tua.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 5 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru, dan SMPN 10 Pekanbaru. Karakteristik agen pelaksana program Sekolah Ramah Anak (SRA) itu yaitu tim pelaksana SRA sejauh ini sudah terlibat saat terjadi tindak kekerasan dapat dilihat bagaimana kepedulian guru dalam menyelaikan pokok permasalahan mencari tahu informasi asal muasal terjadinya kasus perkelahian yang rata-rata masalah dari luar sekolah dibawa ke sekolah. Ruang lingkup program ini jelas mengutamakan terlaksananya program sekolah ramah anak itu bisa *balance* dari segi keamanan sekolah, komunikasi guru dan siswa. Guru dan wali murid.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Karakteristik Agen Pelaksana pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Keterlibatan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak di Sekolah mengalami keterbatasan karena pandemi covid-19 sehingga sekolah banyak belajar jarak jauh.

2. Standar untuk jadi tim pelaksana SRA minimal pendidikan D4 atau S1.
3. Ruang lingkup program SRA fokus pada hubungan sekolah, orang tua dan peserta didik.

#### **5.2.4. Sikap atau Kecenderungan (dispotition) Para Pelaksana**

##### **a. Jenjang Pendidikan SD**

Pada jenjang pendidikan SD sikap atau kecenderungan (dispotition) para pelaksana program sekolah ramah anak ini sudah tersedia dalam bentuk tim pelaksana yang sudah memahami mengenai program sekolah ramah anak. Hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti Yusuf selaku Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru saat ditemui di ruangan Kepala Sekolah.

*“Itu pasti kalau timnya, sudah walau timnya nama yang dimasukkan kesana tapi waktu sosialisasi baik dari sekolah ke guru, gurunya kewali murid, gurunya kemurid diadakannya kegiatan sosialisasi berbagai arah inilah guru telah memahami dan menerima program sekolah ramah anak itu sendiri. Semua pihak mendukung terutama sekolah sangat antusias dengan program ini dengan kerjasama setiap bagian disekolah bukan hanya tim pelaksananya saja”* ungkap Ibu Nurbaiti.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Kota Pekanbaru bahwa tim pelaksana sekolah ramah anak sudah memahami bagaimana pelaksanaan program sekolah ramah anak tersebut hal ini karena diadakannya sosialisasi program SRA ini dari semua tenaga pendidik sudah termasuk tim pelaksana. Bahwa tim pelaksana sudah menerima program ini ketika semua instrumen sekolah berpartisipasi memperlihatkan jika program ini sudah diterima dan menjadi tanggungjawab bersama untuk mewujudkan sekola ramah anak ini.

Hasil Wawancara di SDN 51 Pekanbaru dengan Bapak Sarkani selaku Kepala Sekolah.

*“Dengan terlibatnya semua tenaga pendidik sekolah ini mendakan semua setuju tidak keberatan apalagi menolakan program sekolah ramah anak ini karna tujuannya demi kepentingan dan kebaikan peserta didik juga”*ungkap Bapak Sarkani.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 51 Kota Pekanbaru Tidak ada bentuk penolakan apapun yang dilakukan tim pelaksana Program Sekolah Ramah Anak ini dikarenakan tujuan yang seiring dengan program pemerintah agar tercipta sekolah ramah anak.

Berdasarkan hasil wawancara di SDN 80 Kota Pekanbaru dan SDN 51 Kota Pekanbaru yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan sikap atau kecenderungan agen pelaksana untuk Program Sekolah Ramah Anak ini bahwa tim pelaksana Program SRA ini sudah memahami program ini dari kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak disekoah. Dilakukannya kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program yaitu diadakan sosialisasi program sekolah ramah anak di Sekolah Dasar (SD). Keterlibatan seluruh tenaga pendidik disekolah ini merupakan bentuk penerimaan para pelaksana program sekolah ramah anak dan tidak ada penolakan karena bermanfaat juga untuk peserta didik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 80 Pekanbaru dan SDN 51 Pekanbaru sikap atau kecenderungan karakteristik agen pelaksana sudah memahami program sekolah ramah anak ini bagaimana pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sejauh ini hanya dari kegiatan sosialisasi dan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) oleh kepala sekolah disana juga membahas program sekolah ramah anak yang berada pada klaster empat bagian pendidikan. Karena tujuan program ini memajukan sekolah dan mengutamakan anak semua pelaksana sangat mendukung program ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Sikap atau Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Tim pelaksana program Sekolah Ramah Anak sudah memahami program SRA itu apa dari kegiatan Sosialisasi.
2. Diterimanya program Sekolah Ramah Anak dari terlaksananya berbagai kegiatan pendukung SRA oleh tim pelaksana.
3. Tidak ada tindak penolakan apapun adari tim pelaksana di sekolah saat melaksanakan program Sekolah Ramah Anak.

#### **b. Jenjang Pendidikan SMP**

Program sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan SMP bahwa Tim pelaksana program sekolah ramah anak sudah memahami program ini melalui sosialisasi dari dinas pendidikan.

*“Sudah ada sosialisasi dari dinas pendidikan dari indikator sekolah berdedikasi yang diwujudkan disekolah dari adanya jalur perempuan dan jalur laki untuk siswa disekolah Kata Guru SMPN 10 Pekanbaru Ibu Asti Rusti saat ditemui dirungan wakil kepala sekolah SMPN 10 Pekanbaru.*

Dari hasil wawancara dengan Guru SMP 10 Pekanbaru bahwa tim pelaksana sekolah ramah anak sudah paham bagaimana program ini dengan diberi pembekalan berupa sosialisasi dari dinas pendidikan kota pekanbaru diwujudkan dalam sebuah program lain sekolah yaitu jalur berbeda untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru ibu Tuty Indiriati saat ditemui di aula SMPN 4 Pekanbaru.

*“Program sekolah ramah anak sudah diterima dengan dilaksanakannya berbagai program pendukung berjalannya program ini. Tidak ada penolakan karena sekolah memang tujuannya harus ramah anak.”*  
Ungkap Ibu Tuty.

Dari hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru bahwa sudah terjadi penerimaan disekolah mengenai program sekolah ramah anak ini dapat dilihat dari berjalannya program sekolah ramah anak hingga saat ini dan tidak terjadi penolakan karena tujuan sekolah juga seiring ingin sekolah itu ramah untuk anak.

Hasil Wawancara dengan Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru Ibu Atiah Astuti saat ditemui dilapangan SMPN 5 Pekanbaru.

*“Kalau penolakan enggak sesuai SK saja dilaksanakan karna ramah anak tujuan kita membuat anak nyaman, merasa aman.”*

Dari hasil wawancara dengan Waka SMPN 5 Pekanbaru bahwa untuk Program Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak ada protes atau apapun yang mengisyaratkan penolakan untuk program SRA berjalan dengan prosedur yang semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru dan SMPN 5 Pekanbaru. Dapat disimpulkan bahwa sikap atau kecenderungan para pelaksana program sekolah ramah anak pada sekolah di kota pekanbaru yaitu tim pelaksana sekolah ramah anak mendapatkan bekal sosialisasi dari dinas pendidikan mengenai program sekolah ramah anak yang diwujudkan ke program jalur khusus perempuan dan jalur khusus laki-laki disekolah. Program sekolah

ramah anak sudah diterima dengan baik oleh tim pelaksana sekolah ramah anak pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru karena tujuannya juga demi kepentingan anak. Tidak ada tanda-tanda penolakan untuk melaksanakan program sekolah ramah anak semua terlaksana sesuai standar yang ditetapkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 10 Pekanbaru SMPN 5 Pekanbaru, dan SMPN 4 Pekanbaru. Bahwa program sekolah ramah anak ini sikap atau kecenderungan para pelaksananya memahami program tersebut dari diwujudkannya dalam program lain yang mendukung program SRA. Selain program jalur sekolah juga ada program adiwiyata yang sudah dilaksanakan yang merupakan syarat minimal program sekolah ramah anak yang harus dipenuhi. Para pelaksana program ini menerima dengan baik, untuk penolakan memang sama sekali tidak ada dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena semua sekolah memang mendukung program ini untuk perkembangan sekolah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Sikap atau Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Tim pelaksana SRA sudah memahami program Sekolah Ramah Anak dari pembekalan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kesekolah.

2. Program Sekolah Ramah Anak diterima oleh semua tim pelaksana karena sekolah mengutamakan kenyamanan anak disekolah.
3. Tidak ada protes sama sekali mengenai program ini dari tim pelaksana SRA mereka mengikuti sesuai standar.

#### **5.2.5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

##### **a. Jenjang Pendidikan SD**

Program ini di jenjang pendidikan SD komunikasinya sudah berjalan akurat dan terjalin hubungan yang baik antara Dinas Pendidikan dan Sekolah untuk program sekolah ramah anak ini.

*“Kalau hubungan dengan dinas tidak baik sekolah tidak mungkin dipilih menjadi sekolah ramah anak.”* Kata bapak Sarkani selaku Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru bahwa seiring di tetapkan sekolah sebagai sekolah ramah anak berarti sudah terjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Hasil Wawancara mengenai Koordinasi untuk program sekolah ramah anak dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah dasar (SD)

*“Kita saat melakukan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak akan menghadirkan narasumber dari dinas pendidikan, dan respon dari dinas pendidikan juga sangat antusia dilihat dari hadirnya perwakilan dari dinas untuk memberi edukasi disekolah”* Kata Kepala Sekolah SDN 80 Ibu Nurbaiti Yusuf saat ditemui di rungan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru bahwa terdapat koordinasi yang terjadi diantar sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ketika sekolah mengadakan kegiatan sosialiasi program sekolah ramah

anak disekolah, perwakilan dari dinas datang untuk memberikan edukasi program tersebut kepada orang tua, peserta didik.

Hasil wawancara dengan bapak sarkani selaku Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru tentang komunikasi dan koordinasi program sekolah ramah anak.

*“Setiap program dari dinas pasti selalu ada komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar. Setelah itu baru kita koordinasi seperti saat sosialisasi program sekolah ramah anak kita sering mengundang narasumber juga dari dinas pendidikan”* ungkap Bapak Sarkani.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru bahwa komunikasi sekolah dengan dinas sudah berjalan dengan baik ketika akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi program sekolah ramah anak disekolah, dinas akan lebih dahulu berkomunikasi dengan pihak sekolah hingga kegiatan tersebut akhirnya dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara di SDN 80 Pekanbaru dan SDN 51 Pekanbaru yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana untuk program sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) antara Sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Komunikasi sudah bisa dikatakan akurat. Akurat disini terjalin hubungan yang baik tidak permasalahan antara sekolah dengan dinas pendidikan. Komunikasi sudah baik antara dinas pendidikan dan sekolah hal ini dapat kita lihat dari setiap ada program dinas akan menginfokan secara lengkap diberitahukan mengenai teknis pelaksanaannya sehingga sekolah tidak kebingungan. Koordinasi Sudah terjadi seperti dalam koordinasi kegiatan yang menunjang program sekolah ramah anak. Setiap kegiatan disekolah berkoordinasi dengan salah satunya dinas

pendidikan, pada saat sosialisasi maupun teknis pelaksanaan program sekolah ramah anak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 80 Pekanbaru dan SDN 51 Pekanbaru Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan tim pelaksana sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar rata-rata sudah akurat komunikasinya setia program itu berjalan sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan. Sekolah berlomba-lomba dalam melaksana program Sekolah Ramah Anak (SRA). Komunikasi yang baik antara para pelaksana program SRA yaitu dinas pendidikan dan tim pelaksana SRA dengan komitmen pelaksanaan program ini yang masih berjalan hingga saat ini. Koordinasi dilakukan salah satunya saat ada kegiatan yang memerlukan informasi lebih lanjut diundang beberapa perwakilan dinas sebagai narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas, dapat diinterpretasikan bahwa Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanapada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Sudah terjadi komukasi yang akurat antara Sekolah Ramah Anak dan Dinas Pendidikan mengenai program sekolah ramah anak.
2. Koordinasi sudah dilakukan sekolah dengan Dinas Pendidikan dalam kegiatan sosialisasi program sekolah ramah anak yang diadakan sekolah.

3. Komunikasi sudah berjalan dengan baik dari tidak ada hambatan terlaksananya program sekolah ramah anak disekolah terlaksana hingga kini.

#### **b. Jenjang Pendidikan SMP**

Pada jenjang pendidikan SMP komunikasinya sudah akurat mengenai program sekolah ramah anak antar Dinas Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Indriati selaku Humas SMPN 4 Pekanbaru.

*“Kalau akurat si saya rasa sudah datang tim dari dinas kota pekanbaru, dinas turun kelapangan melihat langsung ada masuk kelas juga bertanya pada anak-anak bagaimana belajar, merasa nyaman itu adan dari dinas.”*  
Kata Humas SMPN4 Pekanbaru Ibu Tuty Indriati.

Dari hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru bahwa Komunikasi antara Sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah akurat, ditandai dengan berpartisipasi dinas pendidikan kan turun kelapangan untuk mengamati langsung kondisi sekolah secara langsung dan berinterkasi dengan peserta didik.

Hasil wawancara dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru Ibu Asti Rusti Kegiatan koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah terlaksana.

*“Sudah, koordiasi dari program-program baru, pelatihan (penataran), lomba-lomba juga petunjuk teknis kegiatannya.”* Ungkap Guru SMPN 10 Pekanbaru Ibu Asti Rusti.

Dari hasil wawancara dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru bawah telah terjadi koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, koordinasi ini terjadi seperti saat adanya program-program baru seperti program sekolah

ramah anak ini sekolah. Dinas akan memberitahu bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan program SRA tersebut.

Hasil Wawancara dengan Ibu Erma Susilawati Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

*“Dinas turun kesekolah langsung untuk program sekolah ramah anaknya ada Tim Monitoringnya dari dinas ya untuk setiap jenjang pendidikan sejauh ini kita melihat program in sudah berjalan dengan baik tidak ada hambatan tidak bisa ditangani.”* Ungkap Ibu Erma.

Dari hasil wawancara di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bahwa Dinas Pendidikan dan SMP untuk program sekolah ramah anak telah memiliki komunikasi yang baik dengan adanya kepedulian Dinas Pendidikan untuk menjadwalkan kunjungannya kesekolah yang rata-rata sekolah sudah baik melaksanakan program ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi antara dinas pendidikan mengenai program Sekolah Ramah Anak (SRA) sudah akurat, dengan turun langsungnya Dinas Pendidikan kesekolah mengamati pelaksanaan program SRA dan berkomunikasi dengan siswa dan siswi mengenai kondisi anak saat belajar. Koordinasi mengenai program ditandai dengan kegiatan pelatihan dan lomba-lomba dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang dilaksanakan Sekolah Menengah Pertama. Komunikasi sudah baik dilihat dari pedulinya dinas pendidikan memonitoring pelaksanaan program SRA di sekolah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru, dan SMPN 5 Pekanbaru bahwa keakuratan komunikasi dinas pendidikan dan dinas pendidikan bisa kita lihat hanya seputar pada kegiatan

pelatihan dan lomba-lomba dari dinas pendidikan yang dilaksanakan disekolah. Mengenai Koordinasi pelatihan dan lomba-lomba itu pada umumnya memang tugas dinas pendidikan mengkoordinasikan setiap kegiatan tersebut. Komunikasi dapat dikatakan baik karena kunjungan dinas pendidikan kesekolah namun kunjungan untuk pelaksanaan program sekolah ramah anak oleh tim monitoringnya hanya satu tahun sekali sesuai dengan jangka waktu penetapan SK sekolah ramah anak pada sekolah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas, dapat diinterpretasikan bahwa Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanapada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Sudah akurat komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan partisipasi dinas kesekolah melihat kondisi nyata program Sekolah Ramah Anak di sekolah.
2. Koordinasi sudah ada antara sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan disekolah.
3. Program sudah terlaksana dengan baik menandakan bahwa komunikasi yang dijalin sudah baik.

#### **5.2.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

##### **a. Jenjang Pendidikan SD**

Keadaan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Kota Pekanbaru untuk jenjang pendidikan SD bahwa lingkungan ekonomi program sekolah ramah anak sejauh ini sudah baik. Hasil wawancara dengan Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ibu Erma Susilawati selaku perwakilam program sekolah ramah anak di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

*“Menyangkut perekonomian Kota Pekanbaru saat ini sudah cukup baik kondisinya orang tua peserta didik minimal sudah memiliki pekerjaan sebenarnya untuk dana sudah dianggarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak berupa Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dan maupun di SD atau SMP untuk SRA orang tua tidak dipungut biaya”* Ungkap Buk Erma.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesiswaan SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bahwa untuk perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru sudah kondusif dengan peyediaan dana dari pemerintah orang tua peserta didik tidak dipungut biaya untuk program sekolah ramah anak.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti Yusuf selaku Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru mengenai lingkungan sosial.

*“Kita bisa lihat dari komunkasi yang lancar kepada murid, kepada guru, kepada masyarakat dengan tidak adanya penolakan malah semuanya mendukung.”* Kata Ibu Nurbaiti Yusuf selaku Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 80 Pekanbaru bahwa lingkungan sosial sekitar berjalan lancar-lancar saja, lingkungan sosial disini lebih difokuskan disekitar sekolah. terlaksananya program ini sudah kondusif antara sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar, tidak mengganggu bagi masyarakat.

Hasil Wawancara mengenai lingkungan politik dengan Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru Bapak Sarkani.

*“Hubungannya politik dengan program sekolah ramah anak, bapak rasa sama sekali tidak ada keterkaitannya tidak mempengaruhi berjalannya program ini.”*kata Bapak Sarkani

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 51 Pekanbaru bahwa keadaan politik lingkungan terlaksananya program sekolah ramah anak masih aman karena tidak berdampak apapun untuk program ini.

Berdasarkan hasil wawancara di SDN 80 Pekanbaru dan SDN 51 Pekanbaru yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi sudah kondusif dari segi orang tua peserta didiknya untuk dana program sekolah ramah anak tidak perlu dibayar oleh orang tua peserta didik. Lingkungan sosial sudah mendukung dari komunikasi yang lancar dengan lingkungan sekitar, sehingga program sekolah ramah anak ini terlaksana dengan lancar. lingkungan politik sekiranya tidak mempengaruhi pelaksanaan program sekolah ramah anak, semuanya dalam kondisi aman.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 51 Pekanbaru dan SDN 80 Pekanbaru bahwa kondisi ekonomi orang tua peserta didik untuk program sekolah ramah anak salah satunya dari pemerintah, pemerintah dalam pendanaan program ini sama saja dengan program sekolah lainnya berasal dari satu dana yang sama, yaitu Dana Bos saja uang dimanfaatkan sekolah sementara dari dunia usaha boleh saja membantu sekolah melalui Dana CSR. Lingkungan sosial sekitar baik-baik saja tidak ada gangguan. Lingkungan politik justru tidak ada mempengaruhi pelaksanaan program sekolah ramah anak sama sekolah sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan

Politik dan Aktivitas Pelaksana pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Lingkungan ekonomi dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak perekonomiannya sudah kondusif dan tidak memberatkan orang tua peserta didik.
2. Lingkungan sosial sudah kondusif masyarakat sekitar tidak terganggu dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak.
3. Lingkungan politik kondusif tidak ada pengaruh dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak dalam kondisi aman.

#### **b. Jenjang Pendidikan SMP**

Program sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan SMP sudah kondusif lingkungan ekonominya. Hasil wawancara dengan Ibu Asti Rusti selaku Guru SMPN 10 Pekanbaru,

*“Keadaan ekonomi mungkin dari orang tua siswa kita bisa lihat nak, disini rata-rata menengahlah orang tuanya bisa dikatakan sederhana sehingga masih stabil-stabil aja anak, untuk dana sekolah ramah anak ini dari peraturan pemerintah untuk sekarang Dana Bos mengikuti regulasi.”*  
Kata Ibu Asti.

Dari hasil wawancara dengan Guru SMPN 10 Pekanbaru bahwa perekonomian di jenjang pendidikan Sekolah Dasar sudah kondusif rata-rata kondisi orang tua peserta didik sederhana, untuk pelaksanaan program sekolah ramah anak sendiri tidak meminta orang tua untuk mendanai, karena dana untuk

sekolah ramah anak ini berdasarkan regulasi kebijakan sekolah ramah anak, salah satunya dari pemerintah itu menggunakan dana bos.

Hasil wawancara mengenai lingkungan sosial dengan Ibu Atiah Astuti selaku Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru berikut.

*“Kalau sosialnya saya rasa sudah kenapa karena watak masyarakat pekanbaru sendiri yang ramah, tidak terlalu keras seperti itu wataknya itu bias dilihat dari saling menyapa.”* Kata Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru Ibu Atiah Astuti.

Dari hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan SMPN 5 Pekanbaru bahwa lingkungan sosial untuk program Sekolah Ramah Anak sudah dalam keadaan kondusif, dilihat dari kondisi disekitar sekolah juga harmonis antara masyarakat sekitar. Tidak ada tindakan protes dari masyarakat sekitar dilakukannya program SRA.

Hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru Ibu Tuty Indriati saat ditemui di Aula SMPN 4 Pekanbaru.

*“Kalau bicara politik di sekolah nak justru sama sekali tidak mempengaruhi program ini tenang tenang saja ibuk lihat tidak ada yang ekstrem mempengaruhi program sekolah ramah anak.”* kata Ibu Tuty

Dari hasil wawancara dengan Humas SMPN 4 Pekanbaru bahwa lingkungan politik disini tidak berkaitan dengan program sekolah ramah anak, keadaan politik tidak pernah mengganggu berjalannya program sekolah ramah anak.

Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 10 Pekanbaru, SMPN 4 Pekanbaru, dan SMPN 5 Pekanbaru yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak ini sudah kondusif dalam keadaan stabil perekonomian orang tua

murid untuk dana bukan tanggungan orang tua yang harus turut mendanai program SRA ini. Lingkungan sosial bisa dilihat dari watak masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak terlalu keras dan tidak mepermasalahkan berjalannya program sekolah ramah anak ini. Lingkungan politik masih aman terkendali tidak ada tindak ekstrem yang berpengaruh pada sekolah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 4 Pekanbaru, SMPN 10 Pekanbaru dan SMPN 5 Pekanbaru ditemukan bahwa Lingkungan ekonomi baik-baik saja dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak berjalan lancar. Lingkungan sosial mengenai watak masyarakat Kota Pekanbaru berada mempersilahkan saja pelaksanaan program sekolah ramah anak ini. Lingkungan politik sendiri bisa dibbilang tenang masih dalam kondisi wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti diatas. dapat diinterpretasikan bahwa Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dan Aktivitas Pelaksana pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Studi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Lingkungan ekonomi masih terkendali, pelaksanaan program sekolah ramah anak perekonomian stabil.
2. Lingkungan sosial masyarakat sekitar hamonis, mendukung program sekolah ramah anak.
3. Lingkungan politik kondusif dalam kondisi tenang tidak ada tindakan ekstrem.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian skripsi dilapangan dapat disimpulkan dari hasil kajian dan pemaparan data untuk Implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak studi program sekolah sekolah ramah anak sudah terimplementasi berhasil pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri di SK-kan Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru yang diperoleh sebagai berikut ini:

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**, sudah terimplementasi berhasil pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri SK Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru dengan kerjasama semua pihak sekolah terlaksananya program-program pendukung Program Sekolah Ramah Anak melingkupi sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah sahabat keluarga. Panduan sekolah ramah anak sebagai standar program ini dan referensi lainnya. Fenomena mengenai tindak kekerasan disekolah saat ini sudah mulai optimal, berkurangnya tidak kekerasan di sekolah sebagai bentuk terciptanya tujuan program sekolah ramah anak.
2. **Sumber Daya**, Sudah tersedia sumber daya untuk Program Sekolah Ramah Anak (SRA) pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri SK Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru. Sumber Daya untuk program sekolah ramah anak ini terdiri dari sumber daya manusia, dana dan jangka waktu. Sudah lengkap tersedia sumberdaya manusia yaitu Tim Pelaksana SRA di sekolah

melibatkan semua bagian dari sekolah itu sendiri. Sumber daya dananya dari Aberbeda tiap sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP negeri ramah anak di Kota Pekanbaru. Fenomena mengenai sumber dana untuk program sekolah ramah anak masih belum adanya transparansi berapa anggaran dana disetiap satuan pendidikan berapa persen. Jumlah anggaran pada satuan pendidikan tidak terlalu dipentingkan lebih ke bagaimana pemanfaatan dana yang ada saja, baik sumber dana dari APBD, Dana Bos, Dana mandiri, dan Dana CSR. Jangka waktu tidak ada batasan waktu program Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan komitmen sekolah melaksanakanya berkepanjangan terus menerus.

3. **Karakteristik Agen Pelaksana**, Tim pelaksana sekolah ramah anak di pada jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri SK Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru terdapat fenomena mengenai tim Pelaksana SRA di sekolah terbatas keterlibatannya karena kondisi covid- 19 mebuat sekolah rata-rata belajar dari rumah hanya beberapa sekolah saja yang diperbolehkan belajar tatap muka. Standar dalam penyusunan tim pelaksana sekolah ramah anak disekolah dari rekomendasi dinas pendidikan, minimal pendidikan D4 atau S1. Ruang lingkup program sekolah ramah anak hanya fokus pada hubungan sekolah, orang tua dan peserta didik.
4. **Sikap Kecenderungan (dispotition) Agen Pelaksana**, Tim pelaksana program sekolah ramah anak pada jenjang SD dan SMP Negeri SK Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru sudah memahami program Sekolah Ramah Anak dari pembekalan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

kesekolah. Program Sekolah Ramah Anak diterima oleh semua tim pelaksana karena sekolah mengutamakan kenyamanan anak disekolah dan terlaksananya berbagai kegiatan pendukung SRA oleh tim pelaksana. Tidak ada tindak penolakan apapun dari tim pelaksana di sekolah saat melaksanakan program Sekolah Ramah Anak mengikuti sesuai standar.

5. **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana,** Komunikasi sudah akurat dalam program sekolah ramah anak (SRA) ini di jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri SK Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru sudah ada komunikasi yang akurat antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan partisipasi dinas kesekolah melihat kondisi nyata program Sekolah Ramah Anak di sekolah. Koordinasi sudah dilakukan sekolah dengan Dinas Pendidikan dalam kegiatan sosialisasi program sekolah ramah anak yang diadakan sekolah. Komunikasi sudah berjalan dengan baik dari tidak ada hambatan terlaksananya program sekolah ramah anak disekolah dapat terlaksana hingga kini.
6. **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik,** Program sekolah ramah anak untuk jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri SK Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru lingkungan ekonomi terbilang kondusif tidak memberatkan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak perekonomian stabil. Lingkungan sosial sudah kondusif serta masyarakat sekitar hamonis, mendukung program sekolah ramah anak. Lingkungan politik sudah kondusif, aman tidak ada pengaruh dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak.

## 6.2. Saran

Saran ini berguna untuk Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini dapat berkembang lebih baik pada Program Sekolah Ramah Anak. Hal ini berguna untuk menjadi bahan rujukan untuk implementasi kebijakan ini kedepannya, saran dari peneliti antara lain:

1. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus menetapkan anggaran dana dengan transparan untuk pelaksanaan program sekolah ramah anak pada setiap sekolah berapa persen dari dana yang dianggarkan. Meskipun memanfaatkan dana yang ada di sekolah tersebut, ketika dana yang ada tidak mencukupi yang diperlukan sekolah tersebut dapat membuat terlambat realisasi kegiatannya. Mengenai tindak kekerasan disekolah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus sering melakukan pemantaun implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di santunan pendidikan di Kota Pekanbaru. Bisa juga sesekali melakukan kunjungan mendadak kesekolah agar terlihat natural bagaimana kondisi yang ada disekolah.
2. Kepada sekolah untuk Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak termasuk semua tenaga pendidik dalam keadaan terbatas keterlibatannya karena virus Covid-19 saat ini dan peserta didik rata-rata banyak sekolah belajar dirumah, sekolah harus bisa bersinergi dengan orang tua peserta didik. Memberikan edukasi selalu pada semua tenaga pendidik, peserta didik dan orang tua peserta didik agar tidak terjadinya tindak kekerasan khususnya saat belajar dari rumah.

3. Kepada peneliti selanjutnya peneliti selanjutnya harus lebih mendalami lagi mengenai fenomena-fenomena dalam pemenuhan hak anak selain rumah juga sekolah. Karena Sekolah adalah rumah kedua bagi anak sebagai tempat anak bertumbuh kembang. Masih banyak yang harus dikembangkan dalam penelitian mengenai program ini, sehingga dapat memberikan masukan-masukan yang akan berguna untuk program ini nantinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hendry dan Tarmizi. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harbani, Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta CV.
- Keban, Yeremias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu Sp. 2012. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian, Proses, dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Riant, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT Media Pressindo.

Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.

Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J.L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Dilengkapi Metode R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Maulida, CC., dan Dian Purwanti. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi*, PAPATUNG, Vol. 1 No. 1, halaman (56-57), Sukabumi, Universitas Muhammadiyah.

Ni'mah, Mamluatun. 2017. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo. Realita. Volume 15, No 1. Probolinggo.

Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. 2017. Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Volume 9, Nomor 02, September 2017. Pekanbaru.

Berita:

Wibowo, Herianto. 2019. LPAI Riau: Pekanbaru Belum Mencermin Kota Layak dan Ramah Anak. Pekanbaru: [www.cakaplah.com](http://www.cakaplah.com).

Nofitra, Riyan. 2019. Polisi: Korban Bullying Dikeroyok Oleh Tiga Teman Sekelas. Pekanbaru: [riauonline.co.id](http://riauonline.co.id).

Sijintak, Rizki Yanda. 2019. Begini Kronologis Pelajar SMP 38 Pekanbaru yang Dibully dan Diancam Guru untuk Tidak Menceritakan Hal Sebenarnya. Pekanbaru: [goriau.com](http://goriau.com).

Dokumen:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Buku panduan penulisan Edisi Revisi, 2013. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

Panduan Sekolah Ramah Anak, 2015. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.